

REVISI akilla sidang.docx

by Student Turnitin

Submission date: 28-Aug-2025 03:22AM (UTC-0700)

Submission ID: 2736811200

File name: REVISI_akilla_sidang.docx (2.36M)

Word count: 25618

Character count: 153415

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan alokasi dana desa menjadi isu yang penting untuk ditelaah, menyusul pengesahan UU no 14 tahun 2014 yang mengamanatkan dana desa sebesar satu miliar rupiah bagi seluruh desa di Indonesia. Dana yang turun diharapkan mampu mencapai seluruh masyarakat, sehingga dapat mendorong sendi-sendi perekonomian yang dimulai dari desa. Program alokasi dana desa tentunya membawa harapan signifikan bagi masyarakat desa, karena alokasi dana desa diharapkan membawa perubahan bagi pembangunan desa. Akan tetapi, meskipun pelaksanaan alokasi dana desa telah berjalan selama beberapa tahun, nyatanya masih banyak desa yang belum maju dan bahkan banyak penduduk desa yang masih hidup di bawah garis kemiskinan (Rohman et al., 2023).

Masalah tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan alokasi dana desa masih belum cukup memuaskan. Selain karena faktor kemandirian desa, hal itu juga disebabkan oleh kegagalan program atau kebijakan di Indonesia, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun institusi di negara ini. Untuk mencegah potensi munculnya penyimpangan, anggaran desa membutuhkan peraturan yang mengatur tentang mekanisme dan tata cara pengelolaan keuangan desa yang mengharuskan adanya transparansi, akuntabilitas dalam setiap pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan amanat yang saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun

desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan masyarakat www.bpk.go.id.

⁸ Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa ini tertuang dalam ¹²Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. APBDes merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa, salah satu komponen yang ada dalam APBDes adalah Alokasi Dana Desa (ADD) (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

¹² Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, Pemerintahan yang baik memiliki karakteristik akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan tertib dan disiplin anggaran. Ruang lingkup pengelolaan Dana Desa, meliputi Penganggaran, pengalokasian, Penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pedoman penggunaan, pemantauan serta evaluasi (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

¹⁹ Fenomena yang terkait dengan adanya penyelewengan dana desa yang merupakan amanat pemerintah pusat kepada perangkat desa untuk digunakan sebaik-baiknya demi kemajuan desa. Amanat ini ternyata masih banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum, tidak sedikit pula kita temui tentang penyimpangan-penyimpangan alokasi dana desa di Indonesia salah satunya yaitu di nihil terdapat

beberapa contoh kasus yaitu:

Eks Bendahara Korupsi Dana Desa Rp600 Juta di Inhil Riau mantan bendahara desa diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dana Desa Kelumpang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2017 sebesar Rp 1,3 miliar. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat, kerugian negara akibat penyalahgunaan dana desa tersebut diperkirakan mencapai 636 juta rupiah. <https://www.metrotvnews.com>

Eks Kades-Sekdes Ditahan di Kasus Korupsi Dana Desa Rp 309 Juta Polres Indragiri Hilir (Inhil) Riau, menahan dua orang tersangka korupsi dana pembangunan desa. Kedua tersangka mantan Kades dan sekretaris desa (sekdes). "Proses penyidikan dugaan korupsi ini pada Maret 2018. Pada 5 November ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan, kedua tersangka adalah, mantan Kades Kecamatan Concong Inhil dan Sekdes. Hasil audit BPKP Riau kerugian negara sebesar Rp309 juta lebih". <https://news.detik.com/berita/>

Kades di inhil jadi tersangka korupsi dana desa, seorang oknum kepala desa di kabupaten Indragiri hilir, riau, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik polres inhil karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) hingga miliaran rupiah. Tersangka melakukan dugaan tindak pidana korupsi tersebut saat aktif mnejabat sebagai kades pada tahun anggaran 2020 dengan nilai anggaran sebesar Rp.1.855.173.150 <https://riau.antaranews.com/berita>.

Dana desa diharapkan dapat membuat desa menjadi desa yang akuntabilitas dan juga transparan dalam pengelolaan alokasi dana desa, untuk mewujudkan

⁵⁰ desa yang mandiri dan sejahtera, untuk itu dana desa harus dapat dilaksanakan oleh perangkat desa untuk menerapkan desa yang *good governance*, maka perangkat desa dan juga masyarakat desa harus memiliki pemahaman terhadap peraturan perundangan dan ketentuan lainnya serta mampu memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan, pertanggung jawaban. Kenyataannya ² masih banyak desa yang belum maju dan bahkan banyak penduduk desa yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak sedikit pula ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan desa. ¹²⁸ Alokasi dana desa (ADD) yang diterima setiap tahun cukup besar dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, serta perekonomian desa. Namun, pengelolaan dana tersebut biasanya mengalami sejumlah masalah yang menghambat efektivitas penggunaannya. Masalah utamanya kurangnya transparansi dan akuntabilitas, perencanaan yang tidak tepat sasaran dan masalah lainnya.

Fenomena pengelolaan ⁷² alokasi dana desa sebagai amanat pemerintah pusat membawa dampak yang signifikan ⁴⁹ terhadap pengelolaan dana desa. Jika dana tersebut dikelola dengan baik, dampak nya bisa sangat positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Sebaliknya, jika pengelolaan yang buruk bisa menimbulkan dampak negatif yang merugikan desa dan masyarakat secara keseluruhan (Rohman et al., 2023). Oleh karena itu, pengawasan yang ketat, transparansi, dan akuntabilitas ⁷³ dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Desa termasuk ke dalam jenis organisasi sektor publik dalam pemerintahan, Desa adalah unit paling bawah

dalam system pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa disebut bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan republik republik Indonesia. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan membawa perubahan yang baik bagi masyarakat khususnya masyarakat desa, untuk mencapai tujuan tersebut tidak terlepas dari peran pemerintahan desa dalam mengatur dan mengelola dana desa.¹⁶ Dana desa merupakan dana APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota yang di prioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Garung & Ga, 2020).

¹² Desa sebagai suatu unit organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan desa mempunyai peran penting dalam menanggapi keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah.¹² Oleh karena itu desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan serta bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan untuk penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa (Maria Nerviana Jawa et al., 2024)..

Untuk mencegah potensi munculnya penyimpangan, anggaran desa membutuhkan peraturan yang mengatur tentang mekanisme dan tata cara

pengelolaan keuangan desa yang saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengelolaan keuangan desa dijelaskan lebih lanjut dalam Permendagri (Kemendagri RI, 2014) tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Yang artinya, keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan pembangunan desa yang mandiri, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberi kewenangan lebih besar dalam mengatur dan mengelola keuangannya sendiri. Hal ini memberikan peluang besar untuk mendorong pembangunan dari bawah, namun juga membawa tantangan serius terkait tata kelola yang baik, khususnya dalam hal akuntabilitas.

Menurut UNDP (*United Nation Development Program* atau dalam bahasa Indonesia disebut program pembangunan perserikatan bangsa-bangsa 1997) satu prinsip *good governance* adalah akuntabilitas. Suatu Pengelolaan dana desa dikatakan akuntabel apabila pengelolaan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Tujuan utama dari reformasi sektor publik adalah terwujudnya akuntabilitas, akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum, pimpinan atau

organisasi kepada pihak yang berhak dan memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Making, A.A.L, 2011).

Menurut Mardiasmo, (2018), akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal). Dalam konteks pengelolaan alokasi dana desa, akuntabilitas menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa dana yang dikelola oleh pemerintah desa digunakan secara tepat, efisien, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Akuntabilitas tidak hanya sebagai pertanggungjawaban keuangan secara formal suatu organisasi tetapi merupakan pertanggungjawaban yang meliputi kepatuhan pada peraturan. Lingkungan organisasi, masyarakat, pemerintah (Mahayani, 2017).

Namun, pada kenyataannya, pengelolaan dana desa di berbagai daerah masih menghadapi persoalan akuntabilitas, termasuk di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Beberapa desa di kabupaten ini menjadi sorotan karena lemahnya pertanggungjawaban penggunaan dana desa, minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, serta kurangnya keterbukaan informasi publik.

Salah satu kasus yang mencuat adalah di Desa Kelumpang, Kecamatan Gaung Anak Serka, di mana oknum mantan Kepala Desa ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polres Indragiri Hilir karena diduga melakukan penyalahgunaan dana APBDes tahun 2017 senilai lebih dari Rp 1,36 miliar. Dana tersebut diduga tidak digunakan sesuai peruntukannya dan menyebabkan kerugian negara yang signifikan. Pelanggaran ini melanggar Pasal 2

dan 3⁸⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) <https://www.riauonline.co.id>. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam arti luas, yaitu melibatkan transparansi dan partisipasi publik, belum berjalan secara optimal.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya diukur dari pelaporan keuangan secara formal, tetapi juga dari bagaimana pemerintah desa melibatkan masyarakat dan membuka informasi secara transparan. Lemahnya akuntabilitas dapat membuka celah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme di tingkat desa.²⁰ Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian lebih dalam¹⁷ mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa, khususnya di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa masih banyak desa yang belum menerapkan prinsip akuntabilitas secara optimal. Masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan sering kali tidak dilibatkan dalam proses pengawasan dan pelaporan, sehingga penggunaan dana desa kurang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Keadaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip ideal tata kelola pemerintahan dengan realita di lapangan. Akuntabilitas yang diharapkan dalam pengelolaan dana desa tidak hanya sebatas laporan administratif, tetapi juga mencakup²⁵ akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses,⁴⁸ akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan (Mardiasmo, 2018). Setiap tahapan pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban harus dapat diaudit, dipertanggungjawabkan, dan terbuka untuk dievaluasi oleh publik.

Rendahnya akuntabilitas dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan menghambat pencapaian *good governance*. Oleh karena itu, penguatan prinsip akuntabilitas menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan. Pemerintah desa harus mampu membangun sistem pertanggungjawaban yang jelas dan dapat diakses oleh masyarakat, serta memastikan setiap pengelolaan dana desa sesuai dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan kepatuhan terhadap hukum.

Transparansi merupakan prinsip penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang terbuka, dapat dipercaya, dan partisipatif. ⁶⁰ Dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD), ⁶⁰ transparansi mencakup keterbukaan informasi terkait perencanaan, penggunaan, dan ⁶⁰ pertanggungjawaban dana desa kepada masyarakat. Menurut Mardiasmo, (2018) ¹² transparansi adalah prinsip yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi secara luas mengenai pengelolaan keuangan publik, termasuk keuangan desa.

Namun pada kenyataannya, implementasi ⁶⁰ transparansi dalam pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu contoh nyata terjadi di Desa Teluk Kanidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Berdasarkan penelitian oleh Lifriance, (2022) diketahui bahwa pemerintah desa telah menyediakan papan informasi terkait APBDes sebagai bentuk keterbukaan. Namun, informasi yang disajikan tidak mencantumkan secara rinci kegiatan apa saja yang dilakukan, berapa anggaran untuk tiap kegiatan, serta sejauh mana realisasinya. Banyak masyarakat desa yang belum mengetahui secara pasti bagaimana dana desa direncanakan dan digunakan.

Informasi terkait APBDes dan laporan realisasi dana tidak selalu dipublikasikan secara terbuka melalui media yang mudah diakses, seperti papan informasi desa atau forum musyawarah terbuka. Seperti fenomena yang terjadi di beberapa desa menunjukkan bahwa prinsip transparansi belum sepenuhnya dilaksanakan dengan optimal. Kurangnya informasi ini berdampak pada lemahnya partisipasi dan Transparansi masyarakat dalam mengontrol dan mengevaluasi program pembangunan desa. keterbukaan informasi mampu meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi publik, serta mendorong efektivitas penggunaan dana desa. Sebaliknya, kurangnya transparansi berpotensi menimbulkan kecurigaan, penyimpangan anggaran, dan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Labangu et al., 2022).

Karakteristik transparansi menurut Mardiasmo, (2018) meliputi *informativeness* (informatif), *openness* (keterbukaan), dan *disclosure* (pengungkapan). Ketiga elemen ini menjadi dasar dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang dapat diawasi oleh masyarakat secara langsung. Dengan mendorong keterbukaan di seluruh tahap pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa akan lebih mudah membangun kepercayaan publik dan ²⁵ **menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan yang berkelanjutan**. Dengan transparansi, informasi mengenai penggunaan dana desa, program kerja, dapat diakses secara terbuka. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi tidak hanya penting sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai landasan untuk menciptakan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*).

Pengawasan merupakan unsur penting dalam sistem pengelolaan dana desa yang sehat dan akuntabel. Dalam praktiknya, pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan berjalan sesuai aturan, efisien, dan tepat sasaran. Pengawasan juga berperan sebagai upaya preventif dan represif dalam mencegah dan menindak penyimpangan penggunaan anggaran. Namun pada kenyataannya terdapat laporan media Riau Pagi menyebut bahwa ada satu desa di Inhil (Desa Pelanduk) yang tersandung hukum karena penggunaan dana desa yang tidak jelas, disebabkan oleh kurangnya audit dan pengawasan oleh Inspektorat <https://riaupagi.com/>.

Dalam konteks desa, pengawasan dapat dilakukan oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, inspektorat daerah, dan bahkan oleh lembaga penegak hukum. Namun dalam kenyataan di lapangan, lemahnya sistem pengawasan menjadi salah satu faktor utama terjadinya penyimpangan dana desa. Di beberapa desa terdapat kasus penyelewengan dana desa melibatkan oknum kepala desa dan sekretaris desa yang tidak terdeteksi sejak awal karena pengawasan tidak berjalan efektif. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya anggaran desa menjadi penyebab lemahnya kontrol sosial di tingkat desa.

Dengan pengawasan yang baik, penyimpangan dapat diminimalkan, dan dana desa dapat digunakan secara optimal untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Rohman et al., 2023). Namun demikian, penelitian lain oleh menunjukkan bahwa pengawasan yang terlalu ketat justru dapat menimbulkan

tekanan bagi aparat desa dalam menjalankan tugasnya, yang pada akhirnya bisa berdampak negatif terhadap kinerja mereka (Azizah Julistioningsih, 2022).

Berdasarkan ⁵² fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dalam pengelolaan dana desa bukan hanya mengenai frekuensi atau formalitas pelaporan, tetapi lebih kepada efektivitas mekanisme kontrol yang diterapkan. Pengawasan yang bersifat edukatif, transparan, dan melibatkan masyarakat secara aktif akan menciptakan ¹⁷ sistem pengelolaan dana desa yang jujur, disiplin, dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Penelitian Rohman et al., (2023) menyatakan Akuntabilitas ² tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance*. ² karena dari statement beberapa warga yang menyatakan bahwa pelaksanaan program-program dana desa belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya, dan pemerintahan desa belum mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional kepada publik melalui laporan pertanggungjawaban. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Safitri, (2023) yang menyatakan bahwa Akuntabilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa untuk mewujudkan *good governance*.

Namun ⁹² hasil penelitian yang dilakukan Balsano Amryanto Bhoka et al., (2023) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh ¹² terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Adanya peningkatan dalam variabel akuntabilitas (X1) akan menyebabkan peningkatan dalam pengelolaan alokasi dana desa (Y). Dalam konteks ini, semakin baik tingkat akuntabilitas, semakin baik pula pengelolaan

alokasi dana desa. Jika ada peningkatan atau perubahan pada akuntabilitas, maka akan berdampak positif pada perubahan dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Garung & Ga, (2020) dan hasil penelitian Labangu et al., (2022) menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Penelitian Rohman et al., (2023) menyatakan Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* (Y). Hal ini dapat disimpulkan bahwa Transparansi adalah salah satu hal yang penting untuk di tingkatkan dan karena adanya keterbukaan secara transparan terhadap masyarakat maupun pihak lain yang membutuhkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Garung & Ga, 2020) dan hasil penelitian (Labangu et al., 2022)

Namun penelitian Balsano Amryanto Bhoka et al., (2023) menyatakan bahwa Transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Artinya tingkat transparansi tidak memiliki dampak yang berarti atau tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Penelitian Rohman et al., (2023) Pengawasan (X3) berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Y). Hal ini dapat menyimpulkan bahwa pengawasan termasuk hal yang harus di perhatikan dalam pengelolaan alokasi dana desa dimana dengan adanya pengawasan maka akan mencegah terjadinya penyelewengan dan kecurangan. Pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa, apabila pengawasan semakin baik maka pengelolaan alokasi

dana desa juga akan berjalan dengan baik dan sesuai, tidak ada kecurangan maupun kesalahan penggunaan dana desa.

Namun penelitian Azizah Julistioningsih, (2022) menyatakan pengawasan tidak berpengaruh. Semakin tinggi pengawasan maka tidak meningkatkan pengelolaan dana desa. Sebab, tingkat pengawasan yang tinggi menyebabkan tekanan pada karyawan untuk melakukan tugasnya. Akibat tekanan yang dihasilkan yang dihasilkan dari pengawasan yang tinggi dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman dalam bekerja karena terus-menerus diawasi.

Dari beberapa mereview penelitian terdahulu penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman dengan metodologi yang solid dan analisis data yang mendalam. Beberapa penelitian sebelumnya telah memberikan wawasan penting tentang ²pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* yang menjadi refrensi penting dalam penelitian ini. karena adanya riwayat ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk menguji dan mengkaji ulang ⁸³pengaruh ¹⁸pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance*

Alasan mengambil variabel akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* didasarkan pada pentingnya peran ketiga aspek tersebut dalam meningkatkan kualitas ²pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance*. Akuntabilitas diharapkan dapat memastikan bahwa setiap penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, meningkatkan kepercayaan

publik, serta mengurangi penyalahgunaan anggaran. Transparansi agar informasi mengenai ³ alokasi dana desa dapat diakses dan terbuka oleh masyarakat. Dengan pengawasan yang efektif, baik dari pemerintah maupun masyarakat, ⁷² juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan guna tercapainya prinsip *good governance*.

Adapun objek penelitian ini yaitu ¹⁰⁴ alokasi dana desa (Y) Akuntabilitas (X₁) Transparansi (X₂) pengawasan (X₃). Penelitian ini dilakukan di kec. Concong, Kecamatan Concong merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Kuala Indragiri, Desa Concong Luar merupakan ibu kota Kecamatan Concong. Kecamatan Concong mempunyai luas wilayah 160,29Km² atau 16,029 Ha, yang berbatasan dengan : → Sebelah Utara dengan Kecamatan Kuala Indragiri → Sebelah Selatan dengan Kecamatan Kuala Indragiri → ⁶ Sebelah Barat dengan Kecamatan Kuala Indragiri → Sebelah Timur dengan Kecamatan Laut Selat Berhala Penduduk Kecamatan Concong pada tahun 2023 berjumlah 11.890 jiwa, yang paling banyak penduduknya adalah kelurahan Concong Luar. Suku di Kecamatan Concong selain suku melayu adalah: → Suku Banjar → Suku Bugis → Suku Jawa → Suku Laut / Duano → Suku Tiong Hua / Keturunan Cina.

Wilayah kecamatan Concong terletak diketinggian 1 s/d 4 meter di atas permukaan laut. Ditepi-tepi sungai dan muara parit banyak terdapat tumbuhan seperti pohon nipah. Kecamatan Concong adalah salah satu Kecamatan di daerah kabupaten Indragiri Hilir Riau dengan ibukota kecamatan yakni Concong Luar terdapat enam desa yaitu concong dalam, concong tengah, kampung baru, sungai

berapit, dan panglima raja. Kecamatan concong berada di aliran sungai di ujung laut, memiliki potensi Perikanan, Perkebunan dan pertanian <https://web-api.bps.go.id/>

Berdasarkan fenomena masalah dan penelitian terdahulu yang terdapat inkonsistensi hasil penelitian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait judul. **“PENGARUH AKUNTABILITAS TRANSPARANSI PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PENCAPAIAN *GOOD GOVERNANCE* DI KECAMATAN CONCONG”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian *Good governance* di kec. concong ?
- 2) Apakah Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian *good governance* di kec. concong ?
- 3) Apakah pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian *good governance* di kec. concong ?
- 4) Apakah Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian *good governance* di kec. concong ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti sebutkan maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menguji secara empiris tentang bagaimana pengaruh Akuntabilitas terhadap pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian *Good goverancae* di kec. Concong.
- 2) Untuk mengetahui dan menguji secara empiris tentang bagaimana pengaruh Transparansi terhadap pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian *good governance* di kec. Concong.
- 3) Untuk mengetahui dan menguji secara empiris tentang bagaimana pengaruh pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* di kec. Concong.
- 4) Untuk mengetahui dan menguji secara empiris tentang bagaimana pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian *good governance* di kec. Concong.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

a) Akuntabilitas

Dengan mengetahui dan memahami konsep akuntabilitas merujuk pada kewajiban untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil. Dalam konteks organisasi atau pemerintahan, manfaatnya meningkatkan kepercayaan, mendorong kinerja yang lebih baik, mengurangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Akuntabilitas mengharuskan aparatur desa untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban. Akuntabilitas secara teoritis berfungsi sebagai kerangka kerja untuk memahami bagaimana kekuasaan

dan tanggung jawab dikelola secara efektif, transparan, dan efisien dalam sebuah entitas atau organisasi untuk mencapai tujuan yang lebih luas.

b) **Transparansi**

Transparansi adalah berarti keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi kepada publik atau pemangku kepentingannya. Adapun manfaatnya meningkatkan kepercayaan, mengurangi penyalahgunaan kekuasaan, dan memperbaiki pengambilan keputusan.

c) **Pengawasan**

Pengawasan adalah proses memonitor dan memeriksa tindakan atau kebijakan yang telah diambil untuk memastikan bahwa tujuan dan standar yang ditetapkan tercapai. Manfaatnya adalah mencegah kecurangan dan penyalahgunaan, meningkatkan efisiensi, memastikan kepatuhan.

d) **Pengelolaan alokasi dana desa**

Mengetahui pengelolaan alokasi dana desa memiliki manfaat yang sangat penting bagi masyarakat, pemerintah desa, maupun pihak yang terkait lainnya. Adapun manfaatnya yaitu meningkatnya transparansi dan akuntabilitas, mendorong peningkatan pembangunan desa, meningkatkan partisipasi masyarakat, efisiensi dan pengelolaan sumber daya, dan meningkatkan kualitas layanan publik di desa.

1.3.2.2 Manfaat praktis

a) **Bagi Peneliti**

Bagi peneliti penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu mengenai prinsip

akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* di kec. concong.

b) ¹⁰ Bagi Pemerintah Desa

Bagi pemerintah desa penelitian ini sangat diharapkan akan bermanfaat pada saat pengambilan kebijakan dalam Alokasi dana desa untuk dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat dan masyarakat desa ikut berpartisipasi langsung dalam kegiatan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

c) ²⁴ Bagi peneliti lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi yang bermanfaat dalam menambah wawasan, memperluas pengetahuan untuk keperluan studi dan untuk mempermudah peneliti selanjutnya.

³⁵
1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori dari penelitian ini serta juga teori-teori yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kinerja keuangan

pemerintah daerah, serta kerangka pemikiran yang menjadi patokan penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang gambaran umum obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran saran yang berhubungan dengan permasalahan yang ada

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi (*agency theory*) menjelaskan hubungan antara pihak pemberi amanah (*principal*) dan pihak penerima amanah (*agent*), di mana *principal* mendelegasikan wewenang kepada agent untuk melaksanakan suatu tugas atau pengelolaan. Dalam konteks pengelolaan alokasi dana desa (ADD), masyarakat desa bertindak sebagai *principal* yang memberikan mandat kepada pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa) sebagai agent untuk mengelola dana yang bersumber dari APBN demi kepentingan masyarakat (Jensen, M. C., & Meckling, 1976).

Teori ini relevan dengan variabel penelitian, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan, karena menekankan pentingnya hubungan pertanggungjawaban antara masyarakat sebagai pihak yang memberi amanah, dan pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan (agen). Dalam kerangka teori agensi, masalah situasi dimana satu pihak dalam suatu transaksi memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih baik daripada pihak lain (asimetri informasi) dan perilaku agen yang mungkin tidak sesuai dengan kepentingan *principal* karena kurangnya pengawasan atau informasi yang tidak lengkap (*moral hazard*) dapat muncul apabila agent tidak bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kontrol berupa:

1. Akuntabilitas, yang menuntut agent untuk mempertanggungjawabkan tindakannya kepada *principal*, baik secara vertikal (kepada otoritas yang

lebih tinggi) maupun horizontal (kepada masyarakat luas). Seperti dijelaskan dalam penelitian (Balsano Amryanto Bhoka⁶⁸ et al., 2023) dan (Labangu et al., 2022) akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa, yang menunjukkan bahwa semakin baik pertanggungjawaban yang diberikan, semakin efektif pula pelaksanaan ADD.

2. Transparansi, sebagai bentuk keterbukaan informasi oleh agent kepada principal, agar principal dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pengelolaan dana. (Rohman et al., 2023) dan (Garung & Ga, 2020)¹²² menyatakan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Ini mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi dapat mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
3. Pengawasan, yang merupakan bentuk kontrol eksternal dan internal terhadap tindakan agent agar tidak menyimpang dari tujuan principal. Hasil penelitian (Rohman et al., 2023)² juga mendukung bahwa pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Pengawasan yang efektif mencegah penyalahgunaan dan memastikan efisiensi penggunaan anggaran.

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketika ketiga pilar ini dijalankan dengan baik, hubungan antara agent dan principal dalam kerangka teori agensi menjadi sehat dan terarah, sehingga mendorong terwujudnya *good governance* di tingkat desa.

Dengan demikian, teori agensi ini memberikan dasar teoritis yang kuat dalam menjelaskan pentingnya penerapan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dalam pengelolaan alokasi dana desa. Prinsip-prinsip tersebut bukan hanya mekanisme pengendali, melainkan juga upaya untuk menjembatani kepentingan antara pemerintah desa dan masyarakat sebagai bentuk nyata dari *good governance*.

2.1.2 Good Governance

2.1.2.1 Pengertian Good Governance

Good governance adalah suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan, partisipatif, dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik untuk kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2018). *World Bank* sebuah lembaga keuangan *international* yang didirikan untuk membantu Negara-negara berkembang dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran, salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* tidak terlepas dari peran masyarakat, dan *stakeholder* yang berkepentingan demi memajukan pembangunan serta pemerintahan daerah yang berguna bagi masyarakat. Maka wujud *good governance* adalah pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang solid, kondusif, dan bertanggungjawab dengan menjaga kesinergian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2018).

Dengan demikian menegaskan bahwa penerapan *good governance* tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya. Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik menjadi faktor penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab. Ketika prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi dapat diterapkan secara konsisten, maka akan terbentuk tata kelola pemerintahan daerah yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik serta mendorong pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas

Dengan kata lain, *good governance* bukan hanya sekadar konsep administratif, tetapi merupakan kerangka kerja yang menuntut kerja sama lintas sektor dan tingkatan pemerintahan demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan *good governance* sangat bergantung pada komitmen bersama untuk menjaga transparansi, memperkuat akuntabilitas, serta membuka ruang partisipasi yang luas dalam setiap proses pengambilan keputusan. Ketiga pilar tersebut saling melengkapi dan membentuk fondasi yang kokoh bagi terciptanya tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien. Transparansi memastikan informasi pemerintahan mudah diakses, akuntabilitas

mewajibkan pertanggungjawaban atas setiap tindakan, dan partisipasi membuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

2.1.2.2 Karakteristik pelaksanaan *good governance*

Mardiasmo, (2018) menyatakan bahwa terdapat beberapa karakteristik utama yang menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan *good governance*, yaitu:

1. Partisipasi (*Participation*)

Masyarakat memiliki ruang untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Kepatuhan pada Hukum (*Rule of Law*)

Pemerintahan dijalankan berdasarkan kerangka hukum yang adil dan ditegakkan secara konsisten tanpa diskriminasi.

3. Transparansi (*Transparency*)

Informasi publik disampaikan secara terbuka, akurat, dan tepat waktu, serta dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk menjamin keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4. Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Pemerintah harus mampu merespons kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara cepat dan tepat.

5. Berorientasi pada Konsensus (*Consensus Orientation*)

Pemerintahan harus mampu menengahi berbagai kepentingan yang ada untuk mencapai keputusan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat luas.

6. Keadilan dan Kesenjangan (*Equity and Inclusiveness*)

Semua kelompok masyarakat, terutama kelompok rentan, harus memiliki ke

sempatan yang sama dalam menikmati hasil pembangunan.

¹⁰¹ 7. Efisiensi dan Efektivitas (*Efficiency and Effectiveness*)

Sumber daya publik harus dikelola secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal dengan biaya yang seefisien mungkin.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Setiap pelaksanaan tugas dan penggunaan sumber daya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan otoritas yang lebih tinggi.

⁵⁶ 9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

Pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jangka panjang dan pandangan strategis dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan.

¹⁰ Menurut Sedarmayanti., (2004) dari sembilan prinsip *Good Governance* tersebut terdapat tiga prinsip utama yang melandasinya yaitu Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. ²⁴ Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *good governance* yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan pengawasan dimana ketika setiap aktivitas pengelolaan telah dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya, lalu di ikuti dengan keterbukaan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan, hal itu akan menciptakan tata kelola yang baik dalam suatu organisasi.

2.1.3 Akuntabilitas

2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (2005) pengertian akuntabilitas adalah Pertanggungjawaban atau keadaan yang dapat dimintai

pertanggungjawaban. Akuntabilitas dalam bahasa inggris biasa disebut *accountability* atau *accountable* yang artinya “dapat dipertanggung jawabkan”.

Menurut Mardiasmo, (2018) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas dalam sektor publik merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga publik kepada masyarakat dan lembaga yang lebih tinggi terhadap pengelolaan sumber daya publik, baik dari segi keuangan, kebijakan, maupun pelaksanaan program kerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), menjamin transparansi, serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi.

Adapun beberapa faktor-faktor Akuntabilitas yang memengaruhi menurut Mardiasmo, (2018) mengidentifikasi empat faktor utama dalam akuntabilitas publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Akuntabilitas kejujuran dan hukum adalah kewajiban untuk bertindak jujur dan taat hukum dalam melaksanakan tugas dan mengelola keuangan negara.

Faktor ini menuntut setiap aparatur pemerintah agar menjalankan pekerjaannya dengan berlandaskan integritas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketaatan hukum ini merupakan landasan dasar dalam

mencegah (KKN), KKN ini merupakan singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses adalah pertanggungjawaban atas efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan proses kegiatan organisasi atau pemerintahan. Faktor ini menilai sejauh mana proses pelaksanaan kegiatan, seperti penyusunan anggaran dan pelaksanaan program, dilakukan sesuai dengan standar, prosedur, dan prinsip efisiensi. Fokusnya bukan hanya pada hasil akhir, tetapi pada bagaimana kegiatan itu dijalankan secara sistematis dan tertib.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program adalah pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan program yang telah direncanakan serta efektivitas hasil yang dicapai terhadap masyarakat. Faktor ini menilai apakah program-program yang dibiayai oleh dana publik (termasuk dana desa) telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak positif yang nyata. Pemerintah wajib mengevaluasi hasil program dan memastikan bahwa manfaatnya tepat sasaran.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan adalah pertanggungjawaban atas keputusan dan kebijakan strategis yang diambil oleh pejabat publik atau pemerintah kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Faktor ini berkaitan dengan legitimasi dan relevansi kebijakan publik. Pemerintah harus mampu menjelaskan alasan, tujuan, dan dasar hukum dari setiap kebijakan yang diambil, serta menerima evaluasi dan kritik dari masyarakat dan DPR/DPRD.

Dengan memahami keempat faktor akuntabilitas menurut Mardiasmo, (2018) pemerintah desa diharapkan tidak hanya menjalankan pengelolaan keuangan secara administratif, tetapi juga membangun sistem pertanggungjawaban yang menyeluruh mulai dari integritas pribadi, efisiensi proses, dampak program, hingga justifikasi kebijakan. Dalam konteks pengelolaan alokasi dana desa, penerapan keempat faktor ini sangat penting untuk mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan dipercaya oleh masyarakat. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban tindakan aparatur pemerintah yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Untuk mewujudkan akuntabilitas mengharuskan aparatur desa untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Menurut Mardiasmo, (2018) akuntabilitas publik dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Adalah bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak yang lebih rendah kepada pihak yang lebih tinggi secara hierarkis dalam struktur pemerintahan atau organisasi. Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas vertikal berarti pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa kepada pemerintah kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat. Contoh: kepala desa melaporkan penggunaan dana desa kepada dinas terkait di tingkat kabupaten melalui laporan keuangan, laporan kegiatan, dan audit internal.

Akuntabilitas vertikal bersifat formal, birokratis, dan bersandar pada peraturan perundang-undangan. Hal ini diperlukan untuk menjamin bahwa setia

jenjang pemerintahan menjalankan kewenangan sesuai aturan dan bertanggung jawab kepada atasan strukturalnya.

2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Adalah pertanggungjawaban pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat secara langsung sebagai pemilik kedaulatan dan penerima manfaat dari kebijakan publik. Dalam konteks desa, akuntabilitas horizontal berarti pemerintah desa harus terbuka dan bertanggung jawab kepada masyarakat desa, terutama dalam hal penggunaan dana, pelaksanaan program, dan pengambilan keputusan publik. Contoh: kepala desa menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada warga dalam musyawarah desa, menyajikan informasi keuangan melalui papan informasi desa, atau menerima pengawasan langsung dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat. Akuntabilitas horizontal menekankan aspek transparansi, partisipasi, dan keterlibatan masyarakat dalam mengontrol kinerja pemerintah secara langsung dan demokratis.

Kedua bentuk akuntabilitas ini saling melengkapi. Akuntabilitas vertikal menjamin kepatuhan terhadap hukum dan hierarki pemerintahan, sedangkan akuntabilitas horizontal menjamin legitimasi publik dan kontrol sosial dari masyarakat. Dalam pengelolaan alokasi dana desa, keberhasilan tata kelola yang baik (*good governance*) sangat bergantung pada sinergi antara kedua jenis akuntabilitas tersebut.

2.1.4 Transparansi

2.1.4.1 Pengertian Transparansi

Transparansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2005) adalah kenyataan dan kejelasan (jelas). Menurut Mardiasmo, (2018) transparansi

merupakan keterbukaan⁸³ pemerintah kepada publik dalam menyediakan informasi yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara. Transparansi⁸⁴ memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu, serta memungkinkan mereka berpartisipasi dalam pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Transparansi adalah suatu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang menekankan pada keterbukaan informasi dan kemudahan akses masyarakat terhadap proses serta hasil pengambilan keputusan pemerintah, khususnya dalam pengelolaan keuangan publik.

Sementara itu, dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, dijelaskan bahwa transparansi merupakan asas pengelolaan keuangan desa yang dilakukan secara terbuka agar masyarakat mengetahui dan memiliki akses terhadap seluruh proses pengelolaan keuangan desa. Transparansi mencakup tiga aspek utama, yaitu:

1. *Informativeness* (informatif)

Penyediaan informasi yang relevan dan mudah dipahami.

2. *Openness* (keterbukaan)

Kemauan pemerintah untuk membuka akses informasi kepada masyarakat.

3. *Disclosure* (pengungkapan)

Komitmen untuk menyampaikan data dan kegiatan secara terbuka kepada publik.

Dengan demikian, transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa berarti bahwa seluruh proses dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan harus

dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam rangka menciptakan *good governance*.⁴⁴ Transparansi berarti suatu keterbukaan secara nyata, menyeluruh, dan memberi ruang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Apabila dikaitkan dengan anggaran, transparansi dapat didefinisikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat yang meliputi fungsi dan struktur pemerintah, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik, dan proyeksi-proyeksinya.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada publik tentang semua informasi yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi⁴⁵ bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu.

Dengan ketersediaan informasi seperti ini, masyarakat dapat mengawasi sehingga kebijakan publik yang ada memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja. Adanya transparansi anggaran membawa dampak positif bagi kepentingan publik.

2.1.5 Pengawasan

2.1.5.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan komponen penting dalam sistem pengelolaan keuangan sektor publik, termasuk dalam pengelolaan alokasi dana desa. Menurut Mardiasmo, (2018), pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak luar untuk melihat dan menilai secara langsung pelaksanaan tugas atau kegiatan pemerintahan, serta untuk mengetahui apakah pelaksanaan tersebut sudah sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan bahwa seluruh proses berjalan efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah direncanakan. Pengawasan dalam konteks ini bukan hanya bersifat administratif atau formalitas belaka, tetapi mencakup proses evaluasi menyeluruh terhadap setiap tahapan pelaksanaan anggaran desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pengawasan yang kuat dan menyeluruh dapat menjadi alat kontrol yang efektif untuk menekan potensi korupsi, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, dan memperkuat akuntabilitas pemerintahan desa.

Pengawasan terhadap dana desa dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk sebagai berikut (Sapartiningsih et al., 2018) :

1. Pengawasan penggunaan APBDes, yaitu pemantauan terhadap penggunaan anggaran agar sesuai dengan rencana dan kepentingan masyarakat;
2. Pengawasan oleh masyarakat, yang memberikan ruang partisipasi aktif dalam mengontrol kebijakan dan implementasinya;
3. Pengawasan internal dan eksternal, yang memastikan evaluasi dilakukan baik oleh aparat desa sendiri maupun oleh lembaga di luar desa;
4. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk checks and balances terhadap kebijakan desa;
5. Pengawasan preventif dan represif, yakni pencegahan terhadap pelanggaran sebelum terjadi, dan evaluasi serta koreksi setelah penyimpangan terdeteksi.

Dengan demikian, pengawasan bukan hanya fungsi teknis, melainkan juga fungsi strategis yang berperan sebagai penyeimbang dan pengendali jalannya

pemerintahan desa. Dalam kerangka *good governance*, pengawasan merupakan salah satu pilar utama selain akuntabilitas dan transparansi. Ketiga aspek ini saling mendukung untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang jujur, terbuka, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara luas.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan Menurut (Mardiasmo., 2018)

1. Ketersediaan Informasi yang Akurat dan Tepat Waktu

Pengawasan yang efektif hanya dapat dilakukan jika pengawas memiliki akses terhadap informasi yang relevan, akurat, dan disajikan secara tepat waktu. Informasi ini berkaitan dengan laporan keuangan, pelaksanaan kegiatan, serta dokumentasi penggunaan anggaran.

2. Transparansi dalam Pelaksanaan Anggaran

Tingkat keterbukaan pemerintah desa terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran sangat memengaruhi ruang lingkup dan kualitas pengawasan. Semakin transparan proses tersebut, semakin mudah dilakukan pengawasan oleh pihak internal maupun eksternal.

3. Partisipasi Aktif Masyarakat

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan *good governance*. Dalam konteks pengawasan, peran masyarakat sebagai pengawas sosial (*social control*) dapat menjadi alat pengawasan horizontal yang kuat terhadap potensi penyimpangan.

4. Komitmen dan Integritas Aparat Pemerintah

Efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh komitmen kepala desa dan

perangkat desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi. jika aparat pemerintah memiliki integritas tinggi, maka pengawasan akan lebih mudah dan lebih berarti

5. Kapasitas dan Kompetensi Pengawas

Pengawasan akan berjalan baik jika dilakukan oleh individu atau lembaga yang kompeten. Keterampilan, pemahaman regulasi, serta kemampuan analisis, dari pengawas sangat menentukan keberhasilan pengawasan. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan.

6. Sistem Pengendalian Internal yang Kuat

Pentingnya adanya sistem pengendalian internal yang baik sebagai bagian dari mekanisme pengawasan internal yang melekat pada organisasi. Sistem ini mencakup prosedur, audit internal, serta pembagian tugas dan wewenang yang jelas. Sistem ini melibatkan semua tingkatan dalam organisasi dan bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan tersebut akan tercapai.

7. Dukungan Regulasi dan Kebijakan

Pengawasan memerlukan dasar hukum yang kuat. Peraturan pemerintah, peraturan desa, dan pedoman teknis yang jelas dan terstandarisasi menjadi landasan bagi pengawasan yang sah dan sistematis.

2.1.6 Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian *Good Governance*

2.1.6.1 Pengertian Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan penyelenggaraan penyediaan uang dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerja sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan

pengelolaan adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban (Ultafiah, 2017).

Menurut Mardiasmo, (2018) ²⁵ alokasi dana desa merupakan bagian dari kebijakan fiskal desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui APBD kabupaten/kota kepada desa, sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan otonomi desa. Dana ini dimaksudkan ⁹³ untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks pencapaian *good governance*, alokasi dana ⁸⁷ desa harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan tertib anggaran. Hal ini sejalan dengan amanat ¹⁰⁵ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa ³¹ harus dilakukan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, ¹⁵ alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* bukan hanya sekadar pendanaan pembangunan, tetapi juga merupakan sarana strategis dalam membentuk ³¹ tata kelola pemerintahan desa yang baik dan berintegritas.

2.1.6.2 Tujuan ⁵² Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian *Good Governance*

Pengelolaan alokasi dana desa yang sesuai dengan prinsip *good governance* memiliki tujuan menurut (Mardiasmo, 2018) sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan desa melalui pengelolaan

anggaran yang tepat guna dan tepat sasaran.

2. Mewujudkan ⁵²transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sehingga dapat mengurangi potensi korupsi dan penyimpangan.
3. Meningkatkan ¹²partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
4. Menjamin keadilan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal.
5. Memperkuat kemandirian dan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola urusan pemerintahan dan pelayanan publik secara profesional.
6. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, yang merupakan fondasi utama dari *good governance*.

Dengan demikian pengelolaan alokasi ³dana desa yang sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo, (2018) memiliki peranan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Tujuan-tujuan tersebut mencakup peningkatan efisiensi dan efektivitas pembangunan, pencegahan korupsi melalui transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa. Selain itu, pengelolaan dana desa yang adil dan merata dapat menjamin keseimbangan pembangunan antar wilayah, disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal.

³¹**2.1.6.3 Kaitan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dengan *Good Governance***

Menurut Mardiasmo, (2018), pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan bagian integral dari penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Dana desa yang dialokasikan setiap tahun dari pemerintah pusat kepada desa melalui

APBD kabupaten/kota bertujuan untuk memperkuat pembangunan desa secara mandiri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pelaksanaan pemerintahan desa yang lebih responsif dan akuntabel. Namun agar tujuan tersebut tercapai, maka pengelolaan dana desa harus didasarkan tiga pilar utama ¹⁷ *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan, sangat erat kaitannya dengan proses ³⁴ pengelolaan alokasi dana desa.

1. Akuntabilitas, Pengelolaan dana desa ³¹ harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan publik. Ini mencakup pertanggungjawaban atas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi penggunaan dana.
2. Transparansi: Informasi tentang anggaran, kegiatan, dan laporan keuangan harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, agar dapat diawasi dan dipercaya.
3. Pengawasan merupakan proses pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran untuk memastikan kesesuaian dengan rencana dan peraturan yang berlaku.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, dana desa dapat benar-benar berfungsi sebagai alat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada masyarakat, yaitu *good governance*.

³⁰ 2.1.6.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan (Mardiasmo, 2018) dan relevansi dengan implementasi di lapangan, faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan ADD meliputi:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak yang diberi amanah mempertanggung

Jawabkan pengelolaan dana kepada pihak yang memberi amanah. Peran dalam pengelolaan dana desa Akuntabilitas menjamin bahwa ²⁵ seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral. Tanpa akuntabilitas, penggunaan dana desa rentan disalahgunakan dan jauh dari prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Akuntabilitas menurut (Mardiasmo, 2018), sejalan dengan (Labangu et al., 2022) yaitu :

⁴⁸
1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

2. Akuntabilitas Proses

3. Akuntabilitas Program

4. Akuntabilitas Kebijakan

2. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam ¹⁵ menyediakan informasi yang relevan dan dapat diakses oleh masyarakat mengenai proses dan hasil pengelolaan keuangan (Mardiasmo, 2018). ⁶ Prinsip keterbukaan memungkinkan masyarakat untuk mengetahui informasi tentang desa secara luas, memastikan bahwa setiap penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik, mencegah penyelewengan, dan memperkuat partisipasi warga desa dalam pembangunan.

Indikator Transparansi menurut (Mardiasmo, 2018) sejalan dengan (Labangu et al., 2022) yaitu :

1. Informativeness (informatif)

2. *Openness* (keterbukaan)

3. *Disclouser* (pengungkapan)

3. Pengawasan

Pengawasan adalah proses pemantauan dan penilaian yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku (Mardiasmo, 2018).

Peran dalam pengelolaan dana desa, Pengawasan berfungsi sebagai alat kontrol untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak pelanggaran dalam pengelolaan keuangan desa. Pengawasan dilakukan baik secara internal (oleh BPD dan perangkat desa) maupun eksternal (oleh inspektorat, masyarakat, dan lembaga pengawas).

Indikator pengawasan menurut (Mardiasmo, 2018) sejalan dengan (Rohman et al., 2023) yaitu :

1. Pengawasan penggunaan APBDes
2. Pengawasan oleh masyarakat
3. Pengawasan secara internal dan eksternal
4. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa
5. Pengawasan secara preventif dan repretif

4. Indikator pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* (Agustina, 2020) sejalan dengan (Rohman et al., 2023) yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan (penyusunan)
2. Pelaksanaan
3. Pengawasan

4. Pertanggungjawaban

Berdasarkan pandangan Mardiasmo, (2018), pengelolaan alokasi dana desa yang baik tidak cukup hanya dengan aturan formal, pengelolaan yang efektif membutuhkan lebih dari sekedar kebutuhan pada regulasi tetapi juga harus dibangun melalui penerapan nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan yang efektif. Ketiga faktor tersebut saling terkait dan mendukung dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang efisien, bersih, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, sesuai prinsip *good governance*.

Pengelolaan keuangan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Pengelolaan dana desa ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana prinsip *good governance* merupakan adanya transparansi, partisipasi, serta pertanggungjawaban pada pelaksanaan pemerintahan juga pembangunan. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana desa. Alokasi dana desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa menurut Agustina, (2020) merupakan “Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Alokasi Dana Khusus”.

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Pergeseran paradigma tata pemerintahan menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan tiga pilar *governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dengan mengembangkan paradigma baru administrasi publik sebagai tata pemerintahan yang baik atau *good governance* (Astuti, T. P., & Yulianto, 2016).

2.2 Penelitian Terdahulu

TABEL 2.1: Penelitian Terdahulu

No	Nama/ tahun	judul data indentitas jurnal	Variabel penelitian dan alat analisis data	Hasil penelitian
1	(Rohman et al., 2023)	Pengaruh akuntabilitas,trans paransi,dan pengawasan terhadap alokasi dana desa dalam pencapaian <i>good governance</i> (studi empiris pada desa pabean kecamatan serati kabupaten sidoarjo)	Akuntabilitas, transparansi,peng awasan , alokasi dana desa dalam pencapaian <i>good governance</i> . Teknik analisa data menggunakan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS 20.	Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian <i>good governance</i> sedangkan Transaparansi dan pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa desa dalam pencapaian <i>good governance</i>
2	(Safitri, 2023)	Pengaruh akuntabilitas,trans paransi,dan partisipasi masyarakat terhadap alokasi dana desa untuk mewujudkan <i>good governance</i> pada desa di kecamatan Ix koto sungai lasi kabupaten solok	akuntabilitas,trans paransi,partisipasi , Alokasi dana desa. teknik analisa data menggunakan regresi linear berganda	Akuntabilitas dan transparansi tidak berpengaruh terhadap alokasi dana desa.
3	(Garung	Pengaruh	Akuntabilitas dan	Akuntabilitas dan

No	Nama/ tahun	judul data identitas jurnal	Variabel penelitian dan alat analisis data	Hasil penelitian
	& Ga, 2020)	akuntabilitas dan tranparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian <i>good governance</i> pada desa manulea,kecamatan sasitamean ,kabupaten malaka	transparansi, alokasi dana desa dalam pencapaian <i>good governane</i> Teknik analisa data regresi lienear berganda	transparansi secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian <i>good governance</i> pada Desa Manulea Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka.
4	(Labang u et al., 2022)	pengaruh akuntabilitas,transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa (add) pada desa labulu-bulu kecamatan parigi kabuoaten muna	Akuntabilitas,tran sparansi,alokasi dana desa Teknik analisa data menggunakan IBM SPSS <i>Statistic 25</i> yaitu analisis regresi linear berganda	Akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan
5.	(Balsano Amryant o Bhoka et al., 2023)	Pengaruh akuntabilitas,transparansi pemerintah desa terhadap alokasi dana desa pada desa detubinga kecamatan tanawawo	Akuntabilitas,tran sparansi,alokasi dana desa Teknik analisa data menggunakan analisis regresi linear berganda	akuntabilitas (X1) pemerintah desa terhadap pengelolaan alokasi dana desa pada desa Detubinga Kecamatan Tanawawo disimpulkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa sedangkan transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa Tanawawo.

Sumber : Data Olahan 2025

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis bagaimana akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan dan dana yang cukup besar untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Namun, besarnya dana desa yang dialokasikan juga membawa tantangan, terutama terkait pengelolaannya yang harus akuntabel, transparan, dan dapat diawasi.

Menurut Mardiasmo, (2018), dalam konteks keuangan sektor publik, prinsip-prinsip dasar *good governance* meliputi akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan. Ketiga prinsip ini menjadi faktor penting dalam menciptakan pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan. Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban atas segala bentuk pengelolaan dana kepada publik dan atasan yang berwenang. Pengelolaan dana desa yang akuntabel akan mendorong terciptanya kepercayaan masyarakat dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Penelitian (Balsano Amryanto Bhoka et al., 2023) dan (Garung & Ga, 2020) membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Transparansi dalam pengelolaan dana desa mencakup keterbukaan informasi kepada masyarakat terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan

penggunaan dana. Hal ini penting untuk mencegah penyimpangan dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. (Rohman et al., 2023) dan (Labangu et al., 2022) menyatakan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa, meskipun (Balsano Amryanto Bhoka et al., 2023) menyatakan dan menyebutkan bahwa pengaruhnya tidak signifikan dalam kondisi tertentu.

Selanjutnya pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan dan rencana. Pengawasan dapat dilakukan oleh masyarakat, BPD, maupun lembaga pengawas pemerintah. Dengan adanya pengawasan yang efektif, pelaksanaan program desa menjadi lebih tertib dan bertanggung jawab. (Rohman et al., 2023) menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa, walaupun (Azizah Julistioningsih, 2022) mengingatkan bahwa pengawasan yang terlalu ketat dapat menimbulkan tekanan psikologis pada aparat desa.

Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan memiliki pengaruh secara signifikan maupun simultan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance*. Akuntabilitas yang baik menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa, sementara transparansi berperan penting dalam mendorong keterbukaan informasi antara pemerintah dan masyarakat dengan adanya transparansi yang baik tingkat transparansi dan pengawasan masyarakat meningkat, karena warga memiliki informasi yang memadai, resiko penyimpangan dan korupsi dapat ditekan, karena tidak ada ruang bagi ketertutupan atau manipulasi data, pemerintah desa terdorong

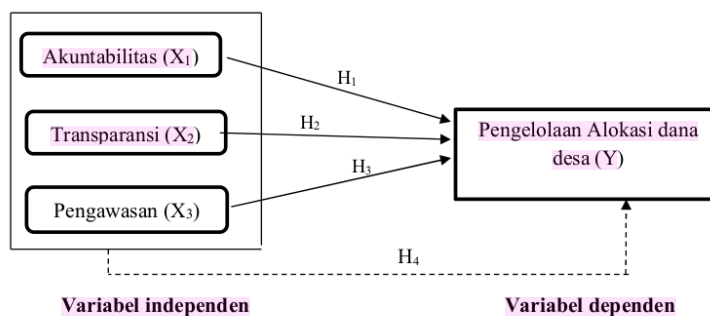
untuk bertindak lebih hati-hati jujur, dan profesional.

Ketiga faktor ini bekerja saling mendukung dan saling memperkuat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Ketiganya merupakan prinsip utama dalam konsep *good governance* dan tidak dapat berdiri sendiri secara optimal jika diterapkan secara terpisah. Dengan mengkaji hubungan antar variabel ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya perbaikan tata kelola keuangan desa yang lebih akuntabel, transparan, dan ada pengawasan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1

Kerangka pemikiran



Keterangan :

- : pengaruh secara parsial
- - - - -→ : pengaruh secara simultan

2.4 Hipotesa

Berdasarkan penjabaran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* pada desa concong dalam kec.concong.

H₂ : Transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* pada desa concong dalam kec.concong.

H₃ : pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* pada desa concong dalam kec.concong.

H₄ : Akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* pada desa concong dalam kec.concong.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Rancangan dari penelitian yang digunakan adalah desain kausal komperatif. Desain kausal komperatif adalah hubungan yang bersifat sebab, akibat yang artinya ada variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi (Sugiyono, 2019). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang dalam penelitian yang dilakukan oleh Sugiyono, (2019) menyatakan bahwa metode kuantitatif adalah pendekatan ilmiah yang memandang suatu realitas itu dapat diklasifikasikan, konkrit, teramati dan terukur, hubungan variabelnya bersifat sebab akibat dimana data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik, artinya adalah segala sesuatu yang diteliti dapat diukur dengan menggunakan angka-angka dan angka-angka tersebut dianalisa menggunakan statistik. Angka-angka dalam penelitian yang sudah dianalisa menggunakan statistik kemudian diolah untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk penelitian ini.

Jenis data penelitian ini adalah data subjek, menurut Indriantaro, (2018) data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). Sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner langsung kepada responden yaitu masyarakat dan pejabat desa di kecamatan concong yang menjadi sampel. Dalam pengukurannya setiap responden diminta pendapatnya mengenai suatu pernyataan

dengan skala penilaian dari 1 sampai 5. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert.⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif, pendekatan asosiatif adalah pendekatan yang digunakan dalam⁸ penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah akuntabilitas, transparansi dan pengawasan sebagai variabel independen, dan pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance*⁴⁸ sebagai variabel dependen.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kec.concong dilihat dari waktu penelitian, data penelitian ini berupa *cross section* data, maksudnya data yang diambil dalam kurun waktu tertentu yaitu selama kurang lebih 3 bulan.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu tersebut dihitung dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2025¹ yang dimulai dari tahap survey tempat penelitian, perizinan, tahap pengumpulan data dan tahap terakhir adalah proses pengolahan data.

2.3 Populasi dan Sampel⁴⁷

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono, (2019), populasi dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Indriantaro, (2018) mendefenisikan populasi adalah suatu kelompok dari elemen penelitian, dimana elemen adalah unit terkecil dari data yang diperlukan. Populasi dalam penelitian ini adalah

masyarakat dan perangkat desa se-Kecamatan concong. Sampel dapat diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut yang akan dipelajari, diamati dan ditarik kesimpulannya (Indriantaro, 2018).

Tabel 3.1

Daftar Jumlah Desa Di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir

No	Nama desa	Jumlah responden
1	Concong dalam	10
2	Concong tengah	10
3	Kampung baru	10
4	Sungai berapit	10
5	Panglima raja	10
TOTAL		50

Pada tabel 3.1 menjelaskan nama-nama desa di kecamatan concong

Tabel 3.2

Populasi

No	Populasi
1	Kepala desa
2	Perangkat desa yang menjalankan PADD di kec.concong
3	Perwakilan masyarakat yang paham tentang pengelolaan alokasi dana desa

Pada tabel 3.2 menjelaskan tentang populasi penelitian

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang diteliti, diambil kesimpulannya dan di amati guna mendapat hasil yang di inginkan menurut (Indriantaro, 2018). Teknik pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, dalam *purposive sampling* penting untuk memastikan bahwa responden yang dipilih memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan topik penelitian. Secara umum untuk penelitian ini 50 responden bisa menjadi jumlah yang cukup dengan teknik *purposive sampling* namun jika memungkinkan untuk menambah jumlah responden untuk meningkatkan

keandalan hasil penelitian. *Purposive sampling* dimana sampel pada penelitian ini yakni perangkat desa yang menjalankan PDD di kecamatan concong responden di setiap desa terdiri dari : kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan perwakilan masyarakat yang paham mengenai pengelolaan alokasi dana desa seperti tokoh masyarakat setempat atau BPD.

Kriteria sampel yang digunakan dalam pengambilan sampel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kriteria Sampel

No	Kriteria sampel
1	Aparatur desa yang berkedudukan sebagai kepala desa.
2	Bendahara desa, Sekretaris desa yang bekerja di kantor desa kec.concong
3	Perwakilan masyarakat yang paham tentang pengelolaan alokasi dana desa seperti tokoh masyarakat setempat, atau Badan Perwakilan Desa (BPD)

Pada tabel 3.3 menjelaskan tentang kriteria penelitian

3.4 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

3.4.1 Variabel Dependen (Y)

3.4.1.1 Pengelolaan Alokasi dana desa (Y)

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran, Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat (Rohman et al., 2023). Menurut peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11 yang dimaksud Alokasi Dana Desa (ADD)

adalah dana yang diberikan kepada Kepala Desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu rangkaian kegiatan dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, pelaporan hingga tahap pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran (PP No 113 tahun 2013).

Adapun indikator Pengelolaan alokasi dana desa menurut (Agustina, 2020) bersumber dari (Rohman et al., 2023) yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan (penyusunan)

Perencanaan (atau penyusunan) merujuk pada elemen-elemen atau faktor-faktor yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu perencanaan atau penyusunan rencana berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator ini membantu dalam mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan suatu perencanaan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merujuk pada elemen-elemen atau ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu rencana atau kegiatan dapat dijalankan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan. Indikator ini penting untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang diinginkan.

3. Pengawasan

Pelaporan merujuk pada ukuran atau kriteria yang digunakan untuk menilai sejauh mana proses pelaporan suatu kegiatan, program, dilakukan dengan akurat,

tepat waktu, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pelaporan yang baik adalah bagian penting dari transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan, serta memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan suatu kegiatan.

4. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merujuk pada ukuran atau kriteria yang digunakan untuk menilai sejauh mana pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan atau proyek bertanggungjawab terhadap tugas, keputusan hasil yang dicapai. Pertanggungjawaban merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa semua pihak menjalankan peran dan kewajiban mereka dengan benar, transparan, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.

Untuk menilai pengaruh pengelolaan alokasi dana desa maka responden diminta untuk menjawab bagaimana persepsi mereka, memilih diantara lima jawaban mulai dari sangat setuju sampai kejawaban sangat tidak setuju pada kuesioner. Kuesioner yang digunakan terdapat 11 pernyataan yang diadopsi dari penelitian Tohari, gunarianto, khajanah (2021) dalam (Madu Munawaroh, 2023), kemudian masing-masing item pertanyaan tersebut kemudian diukur dengan menggunakan skala likert.

Tabel 3.4
Skala Likert Pengelolaan Alokasi Dalam Pencapaian Good Governance

SKALA	KETERANGAN	SKOR
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Kurang Setuju	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : (Sugiyono, 2019)

3.4.2 Variabel Independen (X)

3.4.2.1 Akuntabilitas (X₁)

Menurut Mardiasmo, (2018) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas adalah kinerja aparatur pemerintah desa dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan perundang-undangan. Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa ini dimulai dari perencanaan ADD, pelaksanaan ADD, pertanggungjawaban ADD, dan pengawasan ADD.

Adapun indikator akuntabilitas menurut (Mardiasmo, 2018) bersumber dari (Labangu et al., 2022) yaitu sebagai berikut :

1. Akuntabilitas kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku.

2. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif dalam menjalankan suatu tugas serta pelaporan hasilnya kepada pihak yang berwenang atau publik

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPD/ dan masyarakat luas.

Untuk menilai pengaruh akuntabilitas terhadap alokasi dana desa tersebut maka responden diminta untuk menjawab bagaimana persepsi mereka masing-masing dengan memilih diantara lima jawaban mulai dari sangat setuju sampai dengan jawaban sangat tidak setuju pada kuesioner. Kuesioner yang digunakan terdapat 12 pernyataan yang diadopsi dari penelitian (Ulfah, 2017) dalam (Madu Munawaroh, 2023), dan kemudian masing-masing item pertanyaan tersebut kemudian diukur dengan menggunakan skala likert sebagai skala pengukuran. Adapun pengukuran Skala likert adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Skala Likert Akuntabilitas

SKALA	KETERANGAN	SKOR
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Kurang Setuju	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : (Sugiyono, 2019)

3.4.2.2 Transparansi (X₂)

⁷Transparansi Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi bermakna tersedianya informasi yang ²⁶cukup, akurat dan tepat waktu, dengan ketersediaannya informasi masyarakat dapat mengawasi sehingga kebijakan publik yang ada memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang akan merugikan satu pihak saja. ⁷Keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat juga untuk memberikan kepercayaan lebih kepada pemerintah atas kinerjanya dalam mengelola keuangan ⁷desa. Hal itu sebagai bentuk pengawasan masyarakat atas kinerja pemerintahan desa, dengan adanya transparansi akan membawa dampak positif bagi kepentingan publik.

Indikator transparansi menurut (Mardiasmo, 2018) bersumber dari penelitian (Labangu et al., 2022) yaitu sebagai berikut :

- ⁷1 *Informativeness* (Informatif)
- 2 *Openness* (Keterbukaan)
- 3 *Disclouser* (Pengungkapan)

Untuk menilai pengaruh transparansi terhadap alokasi dana desa tersebut maka ²³responden diminta untuk menjawab bagaimana persepsi mereka masing-masing dengan memilih diantara lima jawaban mulai dari sangat setuju sampai dengan jawaban sangat tidak setuju pada kuesioner. Kuesioner yang digunakan

terdapat 9 pernyataan yang diadopsi dari penelitian (Ultafiah, 2017) dalam (Madu Munawaroh, 2023). Dan kemudian masing-masing item pertanyaan tersebut kemudian diukur dengan menggunakan skala likert sebagai skala pengukuran.

Tabel 3.6
Skala Likert Transparansi

SKALA	KETERANGAN	SKOR
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Kurang Setuju	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : (Sugiyono, 2019)

3.4.2.3 Pengawasan(X₃)

Menurut Mardiasmo, (2018) menjelaskan bahwa pengawasan adalah suatu kegiatan yang mana pihak luar yang dipilih sebagai pengawas untuk mengawasi serta melihat langsung dan mengetahui apa yang terjadi atas kinerja pemerintah. Selain itu pengawasan juga berarti kegiatan yang dilakukan pihak luar untuk melihat langsung dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan pelaksanaan tugas atau kegiatan yang telah diberikan yang pelaksanaannya sesuai atau tidak dengan ketentuan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan di capai. Melalui pengawasan, diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan, pelaksanaan kebijakan dapat dipantau, dievaluasi, dan diperbaiki jika terjadi penyimpangan.

indikator pengawasan menurut (Sapartiningsih et al., 2018) bersumber dari (Rohman et al., 2023) yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan penggunaan APBDes

Pengawasan penggunaan APBDes proses pemantauan dan evaluasi untuk memastikan penggunaan anggaran desa sesuai dengan perencanaan, peraturan dan kepentingan masyarakat.

2. Pengawasan oleh masyarakat

Pengawasan penggunaan APBDes proses pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran oleh masyarakat sendiri.

3. Pengawasan secara internal dan eksternal

Pengawasan internal dilakukan oleh pemerintah desa sendiri untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan APBDes tujuan nya untuk meningkatkan efesiensi, evektifitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Dan pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga independen di luar pemerintah desa tujuan nya untuk meningkatkan transparansi ,aakuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat.

4. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa

Proses pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa untuk memastikan kesesuaian dengan perencanaan,peraturan, dan kepentingan masyarakat.

5. Pengawasan secara preventif dan repretif

Pengawasan seacara preventif adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya masalah atau penyimpangan sebelum hal tersebut terjadi, dengan cara melakukan pemantauan dan perencanaan yang matang. Pengawasan

revretif adalah pengawasan yang dilakukan setelah suatu masalah atau penyimpangan terjadi, dengan tujuan untuk mengidentifikasi penyebab dan mengambil langkah-langkah korektif agar masalah tersebut tidak terulang kembali.

Untuk menilai pengaruh pengawasan terhadap alokasi dana desa tersebut maka responden diminta untuk menjawab bagaimana persepsi mereka masing-masing dengan memilih diantara lima jawaban mulai dari sangat setuju sampai dengan jawaban sangat tidak setuju pada kuesioner. Kuesioner yang digunakan terdapat 7 pernyataan yang diadopsi dari penelitian Luky k. (2015), Hardiyanto, (2013), Rezky (2014) dalam Afiatul Khasanah (2022), dan kemudian masing-masing item pertanyaan tersebut kemudian diukur dengan menggunakan skala likert sebagai skala pengukuran.

Tabel 3.7
Skala Likert Pengawasan

SKALA	KETERANGAN	SKOR
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Kurang Setuju	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : (Sugiyono, 2019)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer, yaitu metode survei. Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan tertulis. Metode ini memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan subjek (responden) penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer

berdasarkan komunikasi antara peneliti dengan responden. Data penelitian berupa data subjek yang menyatakan opini, sikap, pengalaman atau karakteristik subjek penelitian secara individual atau secara kelompok. Data yang diperoleh sebagian besar merupakan data deskriptif (Indriantoro, 2018).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data. Kuesioner yaitu pengumpulan data penelitian pada kondisi tertentu kemungkinan tidak memerlukan kehadiran peneliti. Pertanyaan dan jawaban responden dapat dikemukakan secara tertulis melalui suatu kuesioner. Teknik ini memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan. Kuesioner dapat didistribusikan dengan berbagai cara, antara lain kuesioner disampaikan langsung oleh peneliti, diletakkan ditempat-tempat yang ramai dikunjungi banyak orang, atau menggunakan teknologi komputer.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis ini meliputi pengolahan data, pengorganisasian data dan penemuan hasil. Dalam tahap-tahap analisa data yang digunakan untuk mengukur keabsahan dari hasil penelitian sangat ditentukan oleh alat ukur yang digunakan. Tahap-tahap pengujian dilakukan dengan perhitungan profil responden, distribusi jawaban responden, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesa. Pengolahan data menggunakan SPSS (Ghozali, 2018).

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali, (2018) Statistik deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul melalui nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range,

kurtosis, dan skewness, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Contoh statistik deskriptif yang sering muncul adalah, tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran lain di majalah dan koran-koran. Dengan statistik deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang dapat diperoleh dari statistika deskriptif ini antara lain ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data.

3.6.2 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data merujuk pada proses untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian sudah valid dan reliabel, ada 2 uji kualitas data dalam penelitian ini yaitu uji validitas dan uji reabilitas (Ghozali, 2018).

3.6.2.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali, (2018), Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan – pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan apa yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. untuk mengetahui apakah suatu item dikatakan valid atau tidak maka dilakukan perbandingan antara koefisien r hitung dengan koefisien r tabel. Jika korelasi antar butir dengan skor total lebih dari 0,05 maka instrumen tersebut dinyatakan valid, atau sebaliknya jika korelasi antar butir dengan skor total kurang dari 0,05 maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Dan jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan $\alpha = 0,05$ maka koefisien korelasi tersebut signifikan. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program

SPSS dengan kriteria uji apabila correlated item – total correlation lebih besar dibandingkan dengan 0,05 maka data tersebut kuat (valid).

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali, (2018) menjelaskan bahwa reliabilitas adalah metode untuk mengukur sejauh mana konsistensi atau stabilitas hasil pengukuran suatu kuesioner atau instrument penelitian terhadap suatu variabel atau konstruk. Pengujian ini dilakukan untuk menghitung koefisien Cronbach alpha. Instrumen dapat dikatakan handal (reabel) apabila mempunyai koefisien Cronbach alpha > 0,6. Untuk nilai reliabilitas jika semakin mendekati 1.00 dapat dikatakan skala tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi, semakin mendekati 0, berarti semakin rendah.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Menurut Ghozali, (2018) Uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian memenuhi persyaratan tertentu sehingga hasil regresi dapat diandalkan. uji asumsi klasik dalam penelitian ini yaitu terdiri dari uji normalitas, uji heterokodestisitas, dan uji multikolinieritas. Pengujian asumsi klasik ini dilakukan dengan menggunakan bantuan Software SPSS versi 27.

3.6.3.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali, (2018) Uji normalitas dapat bertujuan untuk menguji apakah variabel independen dan dependen dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas yang menunjukkan distribusi data normal atau mendekati normal menunjukkan bahwa model regresi tersebut

baik, sedangkan jika distribusi data tidak normal, hasil uji statistik dapat terpengaruh. Untuk menguji normalitas data dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan melihat grafik normal *probability plot* dasar pengambilan keputusan dari tampilan grafik normal. *Probability Plot* yaitu jika data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, berarti menunjukkan pola distribusi yang normal sehingga model regresi dapat memenuhi asumsi normalitas. Jika data (titik) menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal berarti tidak menunjukkan pola distribusi normal sehingga model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Kedua, pengujian normalitas yang lainnya adalah dengan menggunakan analisis statistik. Pengujian ini digunakan untuk menguji normalitas residual suatu model regresi adalah dengan menggunakan uji statistik non parametrik KS (*Kolmogorov-Smirnov*). Apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 5%, berarti data residual terdistribusi secara normal.

3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali, (2018) Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedasitas dilakukan dengan melihat grafik scatterplot atau dari nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual eror yaitu ZPRED. Apabila di dalam grafik scatterplot terdapat titik-titik

tersebar dan berpola tidak teratur maka dapat dikatakan bahwa model regresi tidak ditemukan permasalahan heteroskedasitas (Ghozali, 2018).

3.6.3.3 Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali, (2018), uji ini bertujuan menguji apakah pada model regresi ditentukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi yang baik antar variabel independen seharusnya tidak terjadi korelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF) yang dapat dilihat dari output SPSS. Sebagai dasar acuannya dapat disimpulkan:

- a. Jika nilai tolerance > 10% dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.
- b. Jika nilai tolerance 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

3.6.4 Uji Hipotesis

3.6.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali, (2018) Regresi linier berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda, dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Y = Alokasi dana desa

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi

X1 = Akuntabilitas

X2 = Transparansi

X3 = Pengawasan

125 3.6.4.2 Pengujian Koefisien Regresi Parsial (uji-t)

Menurut Ghozali, (2018) ukuran yang 40 digunakan untuk mengukur seberapa baik model regresi dalam menjelaskan variasi variabel terikat (dependent variabel) dengan menggunakan variabel bebas (independent variabel). Pengujian 76 dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesa dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai t hitung $> t$ tabel, maka hipotesa terima. Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut 64 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai t hitung $< t$ tabel, maka hipotesa ditolak. 57 Ini berarti secara parsial independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

56 3.6.4.3 Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali, (2018) uji F adalah metode statistic yang 61 digunakan untuk menguji pengaruh secara bersama-sama (simultan) dari semua variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu model regresi. Kriteria pengujian yang di gunakan adalah jika probability 78 value $< 0,05$, maka H3 diterima dan jika probability value $> 0,05$, maka H3 di tolak. Uji F dapat juga di lakukan dengan membandingkan F hitung dan F tabel. Jika F hitung $> F$ tabel, maka H3 diterima artinya, data yang ada dapat membuktikan bahwa semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika F hitung $< F$ tabel maka

H3 di tolak. Artinya, data yang ada membuktikan bahwa semua variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.6.4.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali, (2018) Koefisien determinasi (R^2) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur seberapa baik model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen melalui variabel bebas. Nilai koefisien determinasi berada di antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

BAB IV

⁷⁴ HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Concong merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Indragiri hilir, yang memiliki 5 desa 1 kelurahan yaitu : Desa Concong dalam, Concong Tengah, Kampung Baru, Sungai Berapit, Panglima raja dan kelurahan Concong Luar. Luas kecamatan concong adalah 160,29Km² atau 16,029 Ha, yang berbatasan dengan : → Sebelah Utara dengan Kecamatan Kuala Indragiri → Sebelah Selatan dengan Kecamatan Kuala Indragiri → ⁶Sebelah Barat dengan Kecamatan Kuala Indragiri → Sebelah Timur dengan Kecamatan Laut Selat Berhala Penduduk Kecamatan Concong pada tahun 2023 berjumlah 11.890 jiwa, yang paling banyak penduduknya adalah kelurahan Concong Luar. Suku di Kecamatan Concong selain suku melayu adalah: → Suku Banjar → Suku Bugis → Suku Jawa → Suku Laut / Duano → Suku Tiong Hua / Keturunan Cina.

Wilayah kecamatan Concong terletak diketinggian 1 s/d 4 meter di atas permukaan laut, ditepi-tepi sungai dan muara parit banyak terdapat tumbuhan seperti pohon nipah. Kecamatan concong berada di aliran sungai di ujung laut, memiliki potensi Perikanan, Perkebunan dan pertanian. <https://web-api.bps.go.id/>

4.1.1 Deskripsi Data

² Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh akuntabilitas, Transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* di kecamatan concong. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa Sekecamatan Concong yang berjumlah 5 desa, dengan kriteria responden

adalah perangkat desa yang terdiri dari: kepala desa, sekretaris desa, bendahara, BPD, dan tokoh masyarakat. Data penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan daftar pernyataan (kuesioner). Distribusi penyebaran kuesioner dapat dilihat pada table 4.1 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Sampel Penelitian

NO	Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
1	Jumlah kuesioner disebar	50	100%
2	Jumlah kuesioner kembali	50	100%
3	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	0	0%
	Total kuesioner yang bisa diolah	50	100%

Sumber : data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.1 dapat kita ketahui bahwa peneliti menyebarkan kuesioner kepada 5 desa, dengan kriteria responden adalah perangkat desa yang terdiri dari: kepala desa, sekretaris desa, bendahara, BPD, dan tokoh masyarakat. Peneliti menyebar sebanyak 50 kuesioner dan kuesioner yang kembali sebanyak 50 kuesioner dan dengan demikian total sampel yang dapat digunakan dan diolah dalam penelitian ini sebanyak 50 sampel.

Jumlah kuesioner yang kembali dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 kuesioner atau 100% dari total kuesioner yang disebar. Kuesioner yang tidak kembali adalah sebanyak 0 kuesioner dengan persentase sebesar 0%. Berikut ini adalah gambaran singkat mengenai tingkat pengambilan (*respon rate*) dari kuesioner penelitian.

4.1.2 Deskripsi Responden

Sumber data dalam penelitian ini menjelaskan tentang profil dari 50 responden yang bekerja pada perangkat desa sekecamatan concong serta memiliki

jabatan sebagai kepala desa, sekretaris desa, bendahara, BPD, dan tokoh masyarakat. Karakteristik responden yang dijelaskan ditinjau dari segi usia, jenis kelamin, jenjang pendidikan SD sampai S-3 dan jabatan.

Adapun rincian demografi responden dan perangkat desa sekecamatan concong dapat dilihat pada table 4.2 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Demografi Responden

No	Data	Jumlah	Persentase
1	Umur/Usia		
	1. 25- 30 Tahun	6	12%
	2. 31- 40 Tahun	24	48%
	3. 41- 50 Tahun	15	30%
	4. 51- 60 Tahun	5	10%
2	Jenis Kelamin		
	1. Laki – Laki	42	84%
	2. Perempuan	8	16%
3	Pendidikan		
	1. S1	14	28%
	2. SMA	28	56%
	3. SMP	5	10%
	4. SD	3	6%
4	Jabatan		
	1. Kepala Desa	5	10%
	2. Sekretaris Desa	5	10%
	3. Bendahara	5	10%
	4. BPD	4	8%
	5. Tokoh masyarakat	31	62%

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4.2 terlihat bahwa responden yang berusia 25-30 tahun sebanyak 6 responden dengan persentase 12%, berusia 31-40 tahun sebanyak 48 responden dengan persentase 30%, berusia 41-50 tahun sebanyak 15 responden dengan persentase 10%, dan 51-60 tahun sebanyak 5 responden dengan presentase 10%. Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini di dominasi oleh responden yang berusia 31- 40 tahun.

Pada data penelitian terdapat 42 laki-laki (persentase 84%) dan 8 responden perempuan (persentase 16%). Hal ini menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh laki-laki. Responden dengan jenjang pendidikan S-1 Sebanyak 14 responden dengan persentase 28%, lulusan SMA sebanyak 28 responden dengan persentase 56%, lulusan SMP sebanyak 5 responden dengan persentase 10%, dan lulusan SD sebanyak 3 responden dengan persentase 6%. Hal ini menunjukkan bahwa responden didalam penelitian ini didominasi responden dengan jenjang karir S-1. Responden yang memiliki jabatan berupa kepala desa sebanyak 5 responden dengan persentase 10%, sekretaris desa sebanyak 5 responden dengan persentase 10%, bendahara sebanyak 5 responden dengan persentase 10%, BPD sebanyak 4 Responden dengan persentase 8%, dan tokoh masyarakat sebanyak 31 responden dengan persentase 62%.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali, (2018) Statistik deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul melalui nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skweness, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. Uji statistik deskriptif memberikan gambaran secara umum mengenai semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara melihat tabel statistik deskriptif yang menunjukkan data yang akan digunakan berupa mean, nilai minimum, nilai maksimum serta standar deviasi. Berikut ini adalah rangkuman hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.3 yaitu :

Tabel 4.3
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian good governance	50	41	55	51,50	3,765
Akuntabilitas	50	44	60	53,48	5,136
Transparansi	50	32	45	40,10	4,287
Pengawasan	50	27	35	31,86	2,807
Valid N (listwise)	50				

Sumber : Data Olahan SPSS 27,2005

Pada tabel 4.3 hasil uji statistik deskriptif yaitu diketahui bahwa jumlah responden (N) yang diolah pada penelitian ini berjumlah 50 responden. Terdapat tiga variabel independen yaitu akuntabilitas, transparansi, pengawasan, dan pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* sebagai variabel dependen. Pada variabel pengelolaan alokasi dalam pencapaian *good governance* (Y) terdiri dari 11 pernyataan, responden memiliki jawaban yang bervariasi yang bervariasi dengan nilai minimal jawaban adalah 41 dan nilai maksimal jawaban adalah 55 dengan rata-rata jawaban adalah 51,50 serta standar devisi 3,765. Variabel akuntabilitas (X_1) terdiri dari 12 pernyataan, responden memiliki jawaban yang bervariasi dengan nilai minimal jawaban adalah 44 dan nilai maksimal jawaban adalah 60 dengan rata-rata jawaban adalah 53,48 serta standar devisi 5,136. Variabel transparansi (X_2) Terdiri dari 9 pernyataan, responden memiliki jawaban yang bervariasi dengan nilai minimal jawaban adalah 32 dan nilai maksimal jawaban adalah 45 dengan rata-rata jawaban adalah 40,10 serta standar devisi 4,287. Variabel pengawasan (X_3) Terdiri dari 7

pernyataan, responden memiliki jawaban yang bervariasi dengan nilai minimal jawaban adalah 27 dan nilai maksimal jawaban adalah 35 dengan rata-rata jawaban adalah 2,807.

4.2.2 Uji Kualitas Data

4.2.2.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali, (2018), Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan – pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan apa yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas menggunakan rumus *degree of freedom* (df) dimana banyaknya sampel penelitian yang diasumsikan dengan nilai (N) atau jumlah sampel dikurangi banyaknya variabel bebas yaitu variabel akuntabilitas (X_1), transparansi (X_2) dan pengawasan (X_3), dan variabel terikat (k) yaitu variabel pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* (Y). Maka diperoleh rumus sebagai berikut: $Df = n - k - 1 = 50 - 3 - 1 = 46$. Berdasarkan tabel *r product moment* diperoleh nilai *r* tabel sebesar 0,2845. Suatu indikator dikatakan valid atau alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid harus menunjukkan nilai *r* hitung > *r* tabel.

Hasil pengujian validitas variabel Akuntabilitas ditunjukkan dalam tabel berikut ini

Tabel 4.4

Hasil Uji Validitas Akuntabilitas (X_1)

Item Pernyataan ke	r Hitung	r Tabel	Sig.	Keterangan
1	0,466	0,2845	0,001	Valid
2	0,436	0,2845	0,002	Valid
3	0,696	0,2845	0,001	Valid
4	0,800	0,2845	0,001	Valid
5	0,826	0,2845	0,001	Valid
6	0,790	0,2845	0,001	Valid
7	0,640	0,2845	0,001	Valid

8	0,632	0,2845	0,001	Valid
9	0,811	0,2845	0,001	Valid
10	0,662	0,2845	0,001	Valid
11	0,669	0,2845	0,001	Valid
12	0,665	0,2845	0,001	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS 27, 2025

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan hasil uji validitas pada variabel akuntabilitas bahwa 12 item pernyataan yang digunakan memiliki r hitung $> r$ tabel (0,2845) atau nilai signifikan $< 0,05$. Item pernyataan pertama dikatakan valid dikarenakan mempunyai r hitung (0,466) $> r$ tabel (0,2845) dengan signifikansi $0,001 < 0,05$. Item pernyataan kedua dikatakan valid dikarenakan mempunyai r hitung (0,436) $> r$ tabel (0,2845) dengan signifikansi $0,002 < 0,05$. Item pernyataan ketiga dikatakan valid dikarenakan mempunyai r hitung (0,696) $> r$ tabel (0,2845) dengan signifikansi $0,001 < 0,05$. Item pernyataan ke empat dikatakan valid dikarenakan mempunyai r hitung (0,800) $> r$ tabel (0,2845) dengan signifikansi $0,001 < 0,05$. Item pernyataan kelima dikatakan valid dikarenakan mempunyai r hitung (0,826) $> r$ tabel (0,2845) dengan signifikansi $0,001 < 0,05$.

Item pernyataan ke enam dikatakan valid dikarenakan mempunyai r hitung (0,790) $> r$ tabel (0,2845) dengan signifikansi $0,001 < 0,05$. Item pernyataan ke tujuh dikatakan valid dikarenakan mempunyai r hitung (0,640) $> r$ tabel (0,2845) dengan signifikansi $0,001 < 0,05$. Item pernyataan ke delapan dikatakan valid dikarenakan mempunyai r hitung (0,632) $> r$ tabel (0,2845) dengan signifikansi $0,001 < 0,05$. Item pernyataan ke Sembilan dikatakan valid dikarenakan mempunyai r hitung (0,811) $> r$ tabel (0,2845) dengan signifikansi $0,001 < 0,05$. Item pernyataan ke sepuluh dikatakan valid dikarenakan mempunyai r hitung

(0,662) > r tabel (0,2845) dengan signifikansi $0,001 < 0,05$. Item pernyataan ke sebelas dikatakan valid dikarenakan mempunyai r hitung (0,669) > r tabel (0,2845) dengan signifikansi $0,001 < 0,05$. Item pernyataan ke dua belas dikatakan valid dikarenakan mempunyai r hitung (0,466) > r tabel (0,665) dengan signifikansi $0,001 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan atau indikator yang digunakan adalah valid dan data tersebut dapat diolah pada tahap penelitian selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Hasil pengujian validitas variabel transparansi ditunjukkan dalam tabel 4.5 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Transparansi (X₂)

Item Pernyataan ke	r Hitung	r Tabel	Sig.	Keterangan
1	0,636	0,2845	0,001	Valid
2	0,789	0,2845	0,001	Valid
3	0,796	0,2845	0,001	Valid
4	0,745	0,2845	0,001	Valid
5	0,749	0,2845	0,001	Valid
6	0,785	0,2845	0,001	Valid
7	0,772	0,2845	0,001	Valid
8	0,793	0,2845	0,001	Valid
9	0,627	0,2845	0,001	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS 27, 2025

Berdasarkan pada tabel 4.5 di atas menunjukkan hasil uji validitas pada variabel transparansi bahwa 9 item pernyataan yang digunakan memiliki r Hitung > r Tabel (0,2845) atau nilai signifikansi < 0,05. Item pernyataan pertama dikatakan valid dikarenakan mempunyai r Hitung (0,636) > r tabel (0,2845) dengan signifikansi $0,001 < 0,05$. Item pernyataan kedua dikatakan valid dikarenakan mempunyai r Hitung (0,789) > r tabel (0,2845) dengan signifikansi $0,001 < 0,05$. Item pernyataan ketiga dikatakan valid dikarenakan mempunyai r Hitung (0,796) > r tabel (0,2845) dengan signifikansi $0,001 < 0,05$.

Item pernyataan keempat dikatakan valid dikarenakan mempunyai r Hitung (0,745) > r tabel (0,2845) dengan signifikansi $0,001 < 0,05$. Item pernyataan kelima dikatakan valid dikarenakan mempunyai r Hitung (0,749) > r tabel (0,2845) dengan signifikansi $0,001 < 0,05$. Item pernyataan keenam dikatakan valid dikarenakan mempunyai r Hitung (0,785) > r tabel (0,2845) dengan signifikansi $0,001 < 0,05$.

Item pernyataan ketujuh dikatakan valid dikarenakan mempunyai r Hitung (0,772) > r tabel (0,2845) dengan signifikansi $0,001 < 0,05$. Item pernyataan kedelapan dikatakan valid dikarenakan mempunyai r Hitung (0,793) > r tabel (0,2845) dengan signifikansi $0,001 < 0,05$. Item pernyataan kesembilan dikatakan valid dikarenakan mempunyai r Hitung (0,627) > r tabel (0,2845) dengan signifikansi $0,001 < 0,05$.

Berdasarkan uraian tabel 4.5 maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan atau indikator penelitian adalah valid atau alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid dan data tersebut dapat diolah pada tahap penelitian selanjutnya yaitu uji reliabilitas untuk melihat kehandalan jawaban seorang terhadap pernyataan apakah konsisten atau stabil.

Hasil pengujian validitas variabel pengawasan ditunjukkan dalam 4.6 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Variabel Pengawasan (X_3)

Item Pernyataan ke	r Hitung	r Tabel	Sig.	Keterangan
1	0,786	0,2845	0,001	Valid
2	0,776	0,2845	0,001	Valid
3	0,661	0,2845	0,001	Valid
4	0,791	0,2845	0,001	Valid
5	0,803	0,2845	0,001	Valid

6	0,783	0,2845	0,001	Valid
7	0,731	0,2845	0,001	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS 27, 2025

Berdasarkan tabel 4.5 di atas menunjukkan hasil uji validitas pada variabel akuntabilitas bahwa 7 item pernyataan yang digunakan memiliki r hitung > r tabel (0,2845) atau nilai signifikan < 0,05. Item pernyataan pertama dikatakan valid dikarenakan mempunyai r hitung (0,786) > r tabel (0,2845) dengan signifikansi 0,001 < 0,05. Item pernyataan kedua dikatakan valid dikarenakan mempunyai r hitung (0,776) > r tabel (0,2845) dengan signifikansi 0,001 < 0,05. Item pernyataan ketiga dikatakan valid dikarenakan mempunyai r hitung (0,661) > r tabel (0,2845) dengan signifikansi 0,001 < 0,05. Item pernyataan keempat dikatakan valid dikarenakan mempunyai r hitung (0,791) > r tabel (0,2845) dengan signifikansi 0,001 < 0,05. Item pernyataan kelima dikatakan valid dikarenakan mempunyai r hitung (0,803) > r tabel (0,2845) dengan signifikansi 0,001 < 0,05. Item pernyataan keenam dikatakan valid dikarenakan mempunyai r hitung (0,783) > r tabel (0,2845) dengan signifikansi 0,001 < 0,05. Item pernyataan ketujuh dikatakan valid dikarenakan mempunyai r hitung (0,731) > r tabel (0,2845) dengan signifikansi 0,001 < 0,05.

Berdasarkan uraian tabel 4.5 maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan atau indikator penelitian adalah valid atau alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid dan data tersebut dapat diolah pada tahap penelitian selanjutnya yaitu uji reliabilitas untuk melihat kehandalan jawaban seorang terhadap pernyataan apakah konsisten atau stabil.

Hasil pengujian validitas variabel pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* ditunjukkan dalam 4.7 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)

Item Pernyataan ke	r Hitung	r Tabel	Sig.	Keterangan
1	0,603	0,2845	0,001	Valid
2	0,642	0,2845	0,001	Valid
3	0,713	0,2845	0,001	Valid
4	0,766	0,2845	0,001	Valid
5	0,777	0,2845	0,001	Valid
6	0,550	0,2845	0,001	Valid
7	0,642	0,2845	0,001	Valid
8	0,603	0,2845	0,001	Valid
9	0,759	0,2845	0,001	Valid
10	0,694	0,2845	0,001	Valid
11	0,645	0,2845	0,001	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS 27, 2025

Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan hasil uji validitas pada variabel akuntabilitas bahwa 11 item pernyataan yang digunakan memiliki r hitung > r tabel (0,2845) atau nilai signifikan < 0,05. Item pernyataan pertama dikatakan valid dikarenakan mempunyai r hitung (0,603) > r tabel (0,2845) dengan signifikansi 0,001 < 0,05. Item pernyataan kedua dikatakan valid dikarenakan mempunyai r hitung (0,642) > r tabel (0,2845) dengan signifikansi 0,001 < 0,05. Item pernyataan ketiga dikatakan valid dikarenakan mempunyai r hitung (0,713) > r tabel (0,2845) dengan signifikansi 0,001 < 0,05. Item pernyataan ke empat dikatakan valid dikarenakan mempunyai r hitung (0,766) > r tabel (0,2845) dengan signifikansi 0,001 < 0,05. Item pernyataan kelima dikatakan valid dikarenakan mempunyai r hitung (0,777) > r tabel (0,2845) dengan signifikansi 0,001 < 0,05. Item pernyataan ke enam dikatakan valid dikarenakan mempunyai r hitung (0,550) > r tabel (0,2845) dengan signifikansi 0,001 < 0,05. Item

pernyataan ke tujuh dikatakan valid dikarenakan mempunyai r hitung $(0,642) > r$ tabel $(0,2845)$ dengan signifikansi $0,001 < 0,05$. Item pernyataan ke delapan dikatakan valid dikarenakan mempunyai r hitung $(0,603) > r$ tabel $(0,2845)$ dengan signifikansi $0,001 < 0,05$. Item pernyataan ke Sembilan dikatakan valid dikarenakan mempunyai r hitung $(0,759) > r$ tabel $(0,2845)$ dengan signifikansi $0,001 < 0,05$. Item pernyataan kesepuluh dikatakan valid dikarenakan mempunyai r hitung $(0,694) > r$ tabel $(0,2845)$ dengan signifikansi $0,001 < 0,05$. Item pernyataan kesebelas dikatakan valid dikarenakan mempunyai r hitung $(0,642) > r$ tabel $(0,2845)$ dengan signifikansi $0,001 < 0,05$.

Berdasarkan uraian tabel 4.5 maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan atau indikator penelitian adalah valid atau alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid dan data tersebut dapat diolah pada tahap penelitian selanjutnya yaitu uji reliabilitas untuk melihat kehandalan jawaban seorang terhadap pernyataan apakah konsisten atau stabil.

4.2.2.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali, (2018) menjelaskan bahwa reabilitas adalah metode untuk mengukur sejauh mana konsistensi atau stabilitas hasil pengukuran suatu kuesioner atau instrument penelitian terhadap suatu variabel atau konstruk. Suatu konstruk atau variabel penelitian dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach's alpha* $> 0,60$ dan apabila *cronbach's alpha* menunjukkan $< 0,60$ maka instrument yang digunakan tidak reliable. Hasil uji reliabilitas masing-masing variabel yang terdapat di dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	Nilai Standar	Keterangan
Akuntabilitas	0,871	0,886	0,60	Reliabel
Transparansi	0,915	0,917	0,60	Reliabel
Pengawasan	0,878	0,880	0,60	Reliabel
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance	0,870	0,880	0,60	Reliabel

Sumber : Data Olahan SPSS 27, 2025

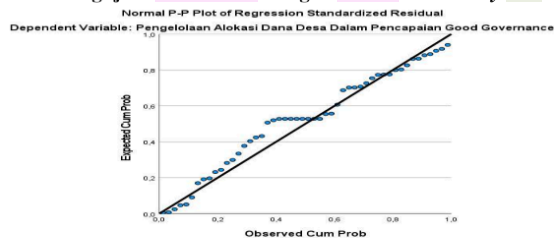
Pada tabel 4.8 menunjukkan nilai cronbach's Alpha atas variabel akuntabilitas (0,871), transparansi (0,915), pengawasan (0,878), dan Pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian Good governance (0,870). Dapat disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan dalam kuesioner penelitian ini adalah reliable karena menunjukkan nilai Cronbach's Alpha > 0,60 dan tidak ada satupun < 0,60. Mengacu pada hasil tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil pengukuran pada masing-masing variabel penelitian adalah reliabel.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

4.2.3.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali, (2018), Uji normalitas dapat bertujuan untuk menguji apakah variabel independen dan dependen dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan melihat data pada grafik normal *p-p plot*, *histogram* dan *non parametik kolmogrov-smirnov (K-S)*. Uji normalitas menggunakan *p-p plot* ditunjukkan pada gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1
Pengujian Normalitas Dengan Grafik Probability Plot



Sumber: Data Olahan SPSS 27, 2025

Berdasarkan gambar 4.1 dapat dilihat dari grafik chart normal probability plot yang mana menunjukkan data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Hal tersebut dikarenakan titik-titik pada gambar distribusi mendekati garis diagonal, tidak melenceng ke kanan dan ke kiri dan penyebaran titik – titik data searah dengan mengikuti garis diagonal. Dapat disimpulkan bahwa distribusi data penelitian adalah normal.

Tabel 4.9
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,1800000
	Std. Deviation	2,95080756
Most Extreme Differences	Absolute	,122
	Positive	,069
	Negative	-,122
Test Statistic		,122
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,060
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	,061
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	,055
	Upper Bound	,067

a. Test distribution is Normal.

- b. Calculated from data.
 - c. Lilliefors Significance Correction.
 - d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 743671174.
- Sumber: Data Olahan SPSS 27, 2025

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, hasil uji *Kolmogorov-smirnov* menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dikarenakan nilai sig. = 0,60 sehingga > 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model penelitian ini memenuhi uji asumsi klasik normalitas *kolmogrov-smirnov*.

4.2.3.2 Uji Multikolineritas

Menurut Ghozali, (2018), uji ini bertujuan menguji apakah pada model regresi ditentukan adanya korelasi antar variabel independen. Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan multikolineritas adalah nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan *VIF* > 10. Jika nilai *tolerance* > 0,10 atau nilai *VIF* < 10 maka dinyatakan tidak terjadi multikolineritas. Adapun hasil output SPSS

Tabel 4.10
Hasil Uji Multikolineritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t		Tolerance	VIF
(Constant)	25,079	5,013			5,002	,000	
Akuntabilitas	,312	,114	,426	2,734	,009	,480	2,084
Transparansi	,324	,134	,369	2,426	,019	,503	1,987
Pengawasan	-,104	,189	-,077	-,547	,587	,586	1,707

a. Dependent Variable: Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance
Sumber: Data Olahan SPSS 27,2025

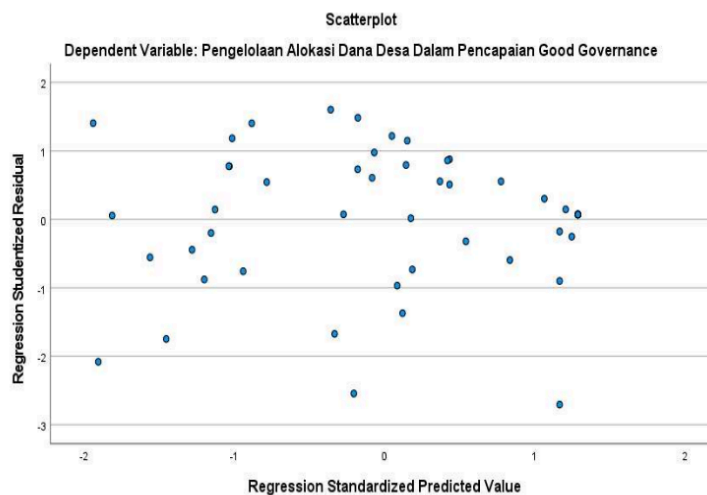
Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa nilai *tolerance* semua variabel independen lebih besar dari 0,10 (*tolerance* > 0,10) dan nilai *VIF* (*Varian Inflation Factor*) lebih kecil dari 10,00 (*VIF* < 10,00). Nilai *tolerance* untuk

akuntabilitas sebesar 2,084, transparansi sebesar 1,987 dan pengawasan sebesar 1,707 dan dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi yang terdapat di dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinieritas.

4.2.3.3 Uji Heterodiktisitas

Menurut Ghozali, (2018), Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Penelitian ini menggunakan grafik *scatterplot* untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heterokedasitas. Jika grafik *scatterplot* menunjukkan tiak beraturan, titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Jika ditemukan pola bergelombang, melebar kemudian menyempit maka telah terjadi heterokedastisitas.

Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan SPSS 27,2022

Berdasarkan gambar 4.3 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak baik di atas maupun dibawah 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Hal tersebut menandakan bahwa tidak terdapat gejala heterokedastisitas dalam model regresi penelitian ini, sehingga data dapat dilanjutkan untuk uji berikutnya.

4.2.4 Uji Hipotesis

4.2.4.1 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali, (2018) Regresi linier berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh tiga variabel independen (akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan) apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negative dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Menggunakan SPSS versi 27, berikut merupakan hasil uji analisis regresi linier berganda:

Tabel 4.11
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24,290	4,698		5,170	,000
	Akuntabilitas	,294	,108	,401	2,730	,009
	Transparansi	,314	,133	,358	2,369	,022
	Pengawasan	-,249	,776	-,038	-,321	,749

a. Dependent Variable: PengelolaanAlokasiDanaDesaDalamPencapaianGoodGovernance

Sumber: Data Olahan SPSS 27,2025

Dari tabel 4.11 uji regresi linier berganda maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 24,290 + 0,294 X_1 + 0,314 X_2 + (-0,249)X_3 + \epsilon$$

Dari persamaan diatas diketahui bahwa :

1. Nilai konstantas sebesar (24,290) menyatakan bahwa jika akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dinilainya 0, maka pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* akan tetap sebesar (24,290).
2. Akuntabilitas memiliki koefesien sebesar 0,294 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan satu persen dari akuntabilitas menyebabkan peningkatan pada pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* sebesar 0,294.
3. Transparansi memiliki koefesien sebesar 0,314 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan satu persen dari transparansi menyebabkan peningkatan pada pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* sebesar 0,314.
4. Pengawasan memiliki koefesien sebesar (-0,249) dan bertanda negatif. Hal ini berarti bahwa ketika setiap kenaikan satu persen dari pengawasan menyebabkan penurunan pada pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* sebesar (-0,249).

4.2.4.2 Uji Parsial (Uji-T)

Menurut Ghozali, (2018) ukuran yang digunakan untuk mengukur seberapa baik model regresi dalam menjelaskan variasi variabel terikat (dependent variabel) dengan menggunakan variabel bebas (independent variabel). Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha = 5\%$). berikut merupakan hasil uji

analisis regresi linier berganda pada tabel 4.12.

Tabel 4.12
Hasil Uji Parsial (Uji-T)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	24,290	4,698		5,170	,000
	Akuntabilitas	,294	,108	,401	2,730	,009
	Transparansi	,314	,133	,358	2,369	,022
	Pengawasan	-,249	,776	-,038	-,321	,749

a. Dependent Variable: Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance

Sumber: Data Olahan SPSS 27,2025

Berdasarkan hasil uji regresi parsial (uj-t) yang ditunjukkan pada tabel 4.12 di atas, maka pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas memiliki t_{hitung} 2,730 sedangkan $t_{tabel} = t(a/2; n-1) = t(0,05/2; 50-3-1) = (0,025; 46) = 2,013$ sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,730 > 2,013$) dengan signifikansi untuk variabel akuntabilitas 0,009 lebih kecil daripada taraf signifikansi 0,05, maka H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance*.
2. Transparansi memiliki t_{hitung} 2,369 sedangkan $t_{tabel} = t(a/2; n-1) = t(0,05/2; 50-3-1) = (0,025; 46) = 2,013$ sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,369 > 2,013$) dengan signifikansi untuk variabel transparansi 0,022 lebih kecil daripada taraf signifikansi 0,05, maka H_2 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance*.

3. Pengawasan memiliki $t_{hitung} -0,321$ sedangkan $t_{tabel} = t(a/2; n-1) = t(0,05/2; 50-3-1) = (0,025; 46) = 2,013$ sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,321 < 2,013$) dengan signifikansi untuk variabel transparansi 0,749 lebih besar daripada taraf signifikansi 0,05, maka H_3 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial pengawasan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance*.

4.2.4.3 Uji simultan (Uji-F)

Menurut Ghozali, (2018) Uji F adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh secara bersama-sama (simultan) dari semua variabel independen terhadap variabel dependen dalam suatu model regresi. berikut merupakan hasil uji analisis regresi linier berganda pada tabel 4.13.

Tabel 4.13
Hasil Uji Simultan (Uji – F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	320,229	3	106,743	13,119	,000 ^b
	Residual	374,271	46	8,136		
	Total	694,500	49			

a. Dependent Variable: PengelolaanAlokasiDanaDesaDalamPencapaianGoodGovernance

b. Predictors: (Constant), Pengawasan , Akuntabilitas, Transparansi

Sumber: Data Olahan SPSS 27, 2025

Berdasarkan tabel 4.13 maka dapat diketahui hasil anova (*analysis of varian*) atau uji F menunjukkan bahwa hasil nilai F_{hitung} sebesar 13,119 lebih besar $F_{tabel} = (4; 50-3-1) = 46$, sehingga diperoleh F_{hitung} sebesar 2,81. Dari tabel 4.13 dapat dilihat bahwa tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf

signifikan yang ditentukan $\alpha = 0,05$ berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan secara bersama-sama atau simultan dan signifikan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance*. H_4 diterima.

4.2.4.4 Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square* (R^2))

Menurut Ghozali, (2018) Koefisien determinasi (R^2) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur seberapa baik model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen melalui variabel bebas. Berikut adalah tabel 4.14 yang menjelaskan hasil pengujian koefisien determinasi atau *adjusted R Square* (R^2) yaitu :

Tabel 4.14
Hasil Uji Koefisien Determinasi/*Adjusted R Square* (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.681 ^a	.463	.428	2,846

a. Predictors: (Constant), Pengawasan, Transparansi, Akuntabilitas

Sumber: Data Olahan SPSS 27, 2022

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi atau *adjusted R square* sebesar 0,428. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* sebesar 42,8% sedangkan sisanya

sebesar 57,2 dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian *Good Governance* Di Kecamatan Concong

Hasil analisis data secara parsial menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* dengan memiliki t_{hitung} sebesar 2,730 sedangkan t_{tabel} sebesar 2,015 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,730 > 2,015$) dengan signifikansi untuk variabel akuntabilitas 0,009 lebih kecil daripada taraf signifikansi 0,05. Akuntabilitas memiliki koefisien sebesar 0,294 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan satu persen dari akuntabilitas menyebabkan peningkatan pada pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* sebesar 0,294.

Hal ini menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance*, berarti semakin menerapkan sikap akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan maka semakin baik pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good Governance* dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Permasalahan akuntabilitas tercermin dari beberapa kasus korupsi yang terjadi di kabupaten Indragiri hilir rendahnya pertanggungjawaban aparat desa terhadap pengelolaan dana menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat serta berkurangnya efektivitas pembangunan. Akuntabilitas yang berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* seperti kinerja aparatur pemerintah desa dari

perencanaan hingga pengawasan kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan melaporkan setiap pelaksanaan kegiatan secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya sesuai dengan perundang-undangan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Labangu et al., (2022) *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa..

4.3.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian *Good Governance* Di Kecamatan Concong

Hasil analisis data secara parsial menunjukkan bahwa variabel transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* dengan memiliki t_{hitung} 2,369 sedangkan t_{tabel} 2,015 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,369 > 2,015$) dengan signifikansi untuk variabel transparansi 0,022 lebih kecil daripada taraf signifikansi 0,05. Transparansi memiliki koefesien sebesar 0,314 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan satu persen dari transparansi menyebabkan peningkatan pada pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* sebesar 0,314.

Hal ini menunjukkan hasil bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance*, adanya Transparansi prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan

desa. Artinya dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai untuk menciptakan tata kelola keuangan yang baik dalam pemerintahan desa. Keterbukaan informasi yang tidak berjalan optimal menjadi salah satu penyebab lemahnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Dalam konteks ini transparansi tidak hanya bermakna sebagai keterbukaan dalam menyajikan informasi, tetapi juga mencakup kemudahan akses serta konsistensi penyampaian informasi kepada publik. Seperti yang terjadi di beberapa desa, informasi APBDes yang hanya disampaikan sebagian atau tidak di perbaharui secara rutin menimbulkan keraguan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi yang diterapkan dengan baik akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi, mengevaluasi memberikan masukan terhadap penggunaan dana desa.

Penelitian ini sejalan dengan Rohman et al., (2023) *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris Pada Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)*. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa

4.3.3 Pengaruh Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance Di Kecamatan Concong

Hasil analisis data secara parsial menunjukkan bahwa variabel pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* dengan memiliki $t_{hitung} -0,321$ sedangkan $t_{tabel} 2,015$ sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,321 < 2,015$) dengan signifikansi untuk variabel transparansi 0,749 lebih besar daripada taraf signifikansi 0,05. Pengawasan memiliki koefisien sebesar -0,249 dan bertanda negative. Hal ini berarti bahwa ketika setiap kenaikan satu persen dari pengawasan menyebabkan penurunan pada pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* sebesar -0,249.

Hal ini menunjukkan hasil bahwa pengawasan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance*. Semakin tinggi pengawasan maka tidak meningkatkan pengelolaan dana desa. Karena, tingkat pengawasan yang tinggi menyebabkan tekanan pada perangkat desa untuk melakukan tugasnya. Akibat tekanan yang dihasilkan dari pengawasan yang tinggi dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman dalam bekerja karena terus-menerus diawasi. Pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa tidak semata-mata berfokus pada seberapa sering pelaporan dilakukan, melainkan pada sejauh mana mekanisme pengawasan yang diterapkan benar-benar efektif dalam mencegah penyimpangan dan memastikan dana sesuai tujuan. Berdasarkan fenomena lapangan lemahnya pengawasan dari aparat pengawas internal maupun masyarakat membuka ruang terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran desa dan lemahnya kontrol sosial di tingkat desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Azizah Julistioningsih, (2022) Pengaruh kompetensi aparatur desa dan pengawasan terhadap pengelolaan dana

desa pada desa di kecamatan menganti kabupaten gresik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

4.3.4 Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian *Good Governance* Di Kecamatan Concong

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan (Uji-f) menunjukkan bahwa F_{hitung} sebesar 13,240 lebih besar F_{tabel} 2,81 dengan df pembilang = 3, df penyebut 46, sehingga diperoleh F_{tabel} sebesar 2,81. Dari tabel 4.13 dapat dilihat bahwa tingkat signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari taraf signifikan yang ditentukan $\alpha = 0,05$ sehingga akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan secara bersama-sama atau simultan dan signifikan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* sehingga H_4 diterima. Artinya apabila di uji secara bersama maka variabel akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan secara bersama-sama atau simultan dan signifikan berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance*. Nilai koefisien determinasi atau (*adjust R square*) sebesar 0,428 atau sebesar 42,8%. Hal ini berarti 42,8% dari variabel perubahan pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* bisa dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan, sedangkan sisanya sebesar 57,2% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Penelitian²² ini sejalan dengan penelitian Rohman et al., (2023) *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris Pada Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo)*. Penelitian ini dilakukan di pemerintah desa di kecamatan sedati kabupaten sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui²³ pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris Pada Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo).²⁴ Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang ada di desa-desa kecamatan sedati. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dimana sampel penelitian ini¹³¹ adalah perangkat desa yang melakukan pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan sedati.⁶² Jumlah responden dalam penelitian ini 75 responden. Teknik analisa yang digunakan adalah regresi linier berganda, koefisien determinasi dan untuk menguji hipotesis yang digunakan adalah uji t dan uji f dengan menggunakan alat IBM SPSS 20.¹⁰⁶ Hasil penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan sedangkan²⁴ transparansi dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance*.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dengan dukungan oleh data-data yang ada, maka peneliti dapat menyusun beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini diperoleh persamaan regresi linier berganda yaitu:
 - a. Nilai konstanta sebesar (24,290) menyatakan bahwa jika akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dinilainya 0.
 - b. Akuntabilitas memiliki koefisien sebesar 0,294 dan bertanda positif.
 - c. Transparansi memiliki koefisien sebesar 0,314 dan bertanda positif.
 - d. Pengawasan memiliki koefisien sebesar -0,249 dan bertanda negatif.
2. Uji secara parsial diketahui bahwa :
 - a. H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian

good governance, dimana semakin tinggi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan maka semakin baik pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good Governance* dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. H_2 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance*, dimana semakin tinggi transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya maka semakin baik pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance*.

c. H_3 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial pengawasan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance*, Semakin tinggi pengawasan maka tidak meningkatkan pengelolaan dana desa. Karena, tingkat pengawasan yang tinggi menyebabkan tekanan pada perangkat desa untuk melakukan tugasnya. Akibat tekanan yang dihasilkan dari pengawasan yang tinggi dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman dalam bekerja karena terus-menerus diawasi.

3. Uji secara simultan, dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas (X_1), transparansi (X_2), dan pengawasan (X_3) secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan alokasi dana desa (Y) pada pemerintah desa sekecamatan concong, sehingga H_4 diterima.

4. Uji koefisien determinasi atau (*adjust R square*) sebesar 0,428 atau sebesar 42,8%. Hal ini berarti 42,8% dari variabel perubahan pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* bisa dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan, sedangkan sisanya sebesar 57,2% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini seperti partisipasi masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini maka peneliti mengajukan beberapa saran untuk perbaikan penelitian di masa yang akan datang yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah desa sebagai pemegang tanggungjawab dalam pengelolaan dana desa diharapkan mampu meningkatkan sikap akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance*, agar dapat mewujudkan pengelolaan anggaran alokasi dana desa yang transparan, akuntabel dan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan.
2. Bagi akademis, diharapkan kampus bisa membantu dengan melakukan kegiatan-kegiatan diluar kampus seperti diadakan sosialisasi di desa agar masyarakat dan perangkat desa tahu bahwa pengelolaan alokasi dana desa itu penting.

3. Untuk peneliti selanjutnya, perlu menambahkan variabel lain yang mungkin akan mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa agar lebih bervariasi dan lebih akurat. Serta menggali lebih dalam peran masyarakat dalam pengawasan dan partisipasi pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiana, V. (2020). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan alokasi dana desa pada desa gunungbatu. Jurnal Mahasiswa Akuntansi, 11–20. <https://journal.sticpasim.ac.id/index.php/JMA/article/download/113/100>
- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694>
- Bhoka, B. A., Rengga, A., & Jaeng, W. M. Y. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Detubinga Kecamatan Tanawawo. GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi, 3(4), 158-172. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i4.873> <https://jurnalstiepari.ac.id/index.php/gemilang/article/download/873/838>
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Edisi Ke-3). Jakarta: Balai Pustaka.
- Garung, C. Y., L. L. Ga. 2020. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian

Good Governance Pada Desa Manulea, Kec. Sasitamean Kab. Malaka.
Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas 8 (1):19 – 27
<https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>

Ghozali, I. (2016). Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro

Ginting, M. C., Simanjuntak, A., Siahaan, S. B., Elisabeth, D. M., & Ginting, J. E. S. (2024). The Influence Of Transparency, Accountability, Community Participation On Village Fund Management In Realizing Good Governance In Mountain Villages In Tigabinanga District" Karo District. Jurnal Ilmiah Accusi, 6(1), 20-29. <https://doi.org/10.36985/2gpmq412>

Hendratni, H., Mulyadi, J., & Widiastuti, T. (2017). Pengaruh Transparansi Dan Komitmen Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran. JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi), 3(2), 76-93. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v3i2.767>

Heru Cahyono, Nyimas Latifah Letty Aziz, Moch. Nurhasim, Agus R. Rahman, & R. Siti Zuhro. (2020). Pengelolaan Dana Desa Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintah Desa (Vol. 1). https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=2E4Y5G4AAAAJ&citation_for_view=2E4Y5G4AAAAJ:5nxA0vEk-isC

Indah Hanifah, S. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, 4(8), 1-15.

Indriantoro, Nur. (2018). Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. Human Relations, 72(10), 1671-1696. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>

KHASANAH, ALFIATUN (2020) PENGARUH PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA, AKUNTABILITAS, DAN TRANSPARANSI DANA DESA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Pemerintahan di Eks Karisidenan Semarang) Universitas Islam Sultan Agung Semaang <https://repository.unissula.ac.id/20103/>

Lifriance, Annisa. (2022). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD): Studi Kasus di Desa Teluk

- Kanidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Universitas Islam Riau. <https://repository.uir.ac.id/13682/1/185310570>.
- Labangu, Y. L., & Nurhayati, N. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Pada Desa Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 223-235. <https://doi.org/https://doi.org/10.56910/gemilang.v3i4.873>
- Munawaroh, madu (2024) *PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA-ESA DI KECAMATA MARO SEBO ULU KABUPATEN BATANGHARI*. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi. <https://repository.unja.ac.id/60212/1/Skripsi%20madu%20unja%20fix%20untuk%20yudisium%20terbaru.pdf>
- Mahayani, N. L. A. (2017). Prosocial Behavior Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 129. <https://doi.org/10.24843/jiab.2017.v12.i02.p07>
- Making, A.A.L., & Handayani, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, vol. 6, 11–18. <https://doi.org/10.36407/jrmb.v6i1.315>
- Mardiasmo, 2018. Akuntansi Sektor publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pengelolaan keuangan <https://peraturan.bpk.go.id/Details/%20139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Rohman, M. T., Yuniarti, N. L., Lating, A. I. S., Nufaisa, N., & Aristantia, S. E. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris Pada Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo). *LIABILITIES (JURNAL PENDIDIKAN AKUNTANSI)*, 6(3), 31-42. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/liabilities.v6i3.15557>
- Safitri, H. S. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Trasparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Alokasi Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Ix Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, E-ISSN; 2987-9078. Vol. 1(3), 250-259. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jakbs/article/download/169/167>
- Sapartiningsih, D., Suharno, & Kristianto, D. (2018). Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, E-ISSN 1693-7635 vol.14(1 Maret), 100–114.
<https://jurnal.usi.ac.id/index.php/jia/article/download/301/362>

¹⁵ Sedarmayanti. (2004). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: CV Mandar Maju.

¹ Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

¹⁶ Ultafiah Weny. 2017. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Labat.” Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Dipublikasikan.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
<https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/173985/UU%20062014.pdf>

⁴⁹ UU No 14 tahun 2014 Tentang Desa
<https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/173985/UU%20062014.pdf>

⁵ WINDY, W. (2022). *ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA* (Doctoral dissertation, STIESIA SURABAYA). E-ISSN : 2461- 0585.
<https://share.google/xDqt46lhbenLjUxN6>

<https://news.detik.com/berita/>

<https://riaupagi.com/news/20-desa-di-riau-tersandung-hukum-dalam-penggunaan-dana-desa-lked-nas-inspektorat-perlu-lakukan-audit-awasi-anggaran-202211093363/>

<https://riau.antaranews.com/berita>.

⁴⁸ <https://web-api.bps.go.id/>

<https://www.metrotvnews.com>

www.bpk.go.id

LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN

KUESIONER PENELITIAN

Pengaruh akuntabilitas,transparansi,dan pengawasan terhadap alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian *good governance* di kecamatan concong.

I. UMUM

Kepada responden yang terhormat, dengan ini saya memohon ketersediaannya Bapak/ibu untuk berpartisipasi dalam mengisi seluruh butir pertanyaan yang terdapat pada kuesioner penelitian oleh Akilla Natasya dengan judul “Pengaruh akuntabilitas,transparansi,dan pengawasan terhadap alokasi dana desa dalam pencapaian *good governance* kec.concong” dengan tujuan melengkapi data pada penelitian dalam rangka menyusun tugas akhir yaitu skripsi. Pada pengisian kuesioner ini saya mengharapkan kepada Bapak/ibu untuk memberikan informasi dan menjawab pertanyaan dengan kejujuran, dan untuk kerahasiaan

jawaban tidak akan saya sebar ke orang lain sehingga kerahasiaan responden akan aman dan tidak diketahui orang lain. Dengan demikian atas ketersediaannya saya mengucapkan terimakasih.

II. Identitas responden

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Pendidikan Terakhir :

Lama bekerja :

Jabatan :

III. Petunjuk pengisian kuisioner

Bapak/ibu/saudara/saudari akan diberikan beberapa pertanyaan dengan sesuai dengan indikator yang diberikan. Dan Bapak/ibu/saudara/saudari hanya memberikan tanda silang (X) pada pilihan atau pendapat sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Pada setiap pertanyaan yang diberikan hanya diperbolehkan satu jawaban, dan jawaban yang dipilih memiliki tingkat atau skor sesuai dengan pendapat yang dipilih dengan ketentuan skor sebagai berikut :

Keterangan	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER

Indikator 1 : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)

No	Indikator	Pertanyaan	Skor dan jawaban
----	-----------	------------	------------------

			1	2	3	4	5
			STS	TS	N	S	SS
1	Perencanaan	1. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang apbdesa berdasarkan rkp desa tahun berjalan.					
		2. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan oleh kepala desa kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama.					
		3. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama di sampaikan oleh kepala desa Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk di evaluasi.					
2	Pelaksanaan	4. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui kas desa, dan harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah.					
		5. Pemerintah desa tidak melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang di tetapkan dalam peraturan desa.					
		6. Pengeluaran biaya tak terduga terlebih dahulu harus di buat rincian anggaran biaya/RAB yang telah disahkan oleh kepala desa.					
		7. Pemerintah desa berperan dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi					

		secara jelas kepada masyarakat dalam proses pelaksanaan program yang didanai dari alokasi dana desa sudah baik.					
3	Pengawasan	8. Bendahara desa, wajib melakukan pencatatan setiap menerima dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.					
4	Pertanggung jawaban	9. kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun.					
		10. kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.					
		11. pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah di akses masyarakat, antara lain papan pengumuman dan media informasi lainnya.					

Sumber : Tohari, gunariato, khojanah (2021)

Indikator 2 : Akuntabilitas (X1)

No	indikator	Pertanyaan	Skor dan jawaban				
			1	2	3	4	5
			STS	TS	N	S	SS
1	Akuntabilitas hukum dan kejujuran	1. Pemerintah desa memiliki prosedur hukum pedoman pengelolaan dana desa sebagai landasan dalam pembuatan keputusan administrasi publik yang harus dihormati oleh pemerintah desa untuk menghindari korupsi.					

		2. Proses pertanggungjawaban dan pengelolaan dana desa diawasi secara terus menerus oleh pengawas internal dan eksternal agar terciptanya praktik yang sehat.					
		3. Pemerintah desa telah memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah desa dan menerima saran masyarakat untuk kinerja pemerintah selanjutnya dan menghindari penyalahgunaan jabatan.					
2	Akuntabilitas manajerial	4. Proses penetapan program-program dana desa dirancang dengan mempertimbangkan efektivitas penggunaan anggaran.					
		5. Pemerintah desa telah menetapkan rencana strategi dan asas umum pengelolaan keuangan desa sebagai dasar dalam pengelolaan dana desa.					
		6. Pengealokasian dana anggaran mengikuti proses dan prosedur yang berlaku.					
3	Akuntabilitas program	7. Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam penggunaan dana desa.					
		8. Dalam perencanaan pengelolaan dana desa pemerintah desa telah memperhitungkan analisis biaya manfaat yang tidak terbatas dari segi ekonomi tetapi juga social dan sebagainya.					
		9. Pelaksanaan program-program dana desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.					
4	Akuntabilitas	10. Pemerintah desa telah					

	kebijakan	mampu menjelaskan menjawab dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara profesional kepada publik secara professional kepada publik melalui laporan pertanggungjawaban.					
		11. Pelaksanaan kebijakan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa kepada pemerintah di atasnya.					
		12. Anggaran yang dirancang ditetapkan sesuai dengan realisasi yang dianggarkan.					

Sumber : Weny Ulfiah (2017)

Indikator 3 : Transparansi (X2)

No	Indikator	Pertanyaan	Skor dan jawaban				
			1	2	3	4	5
			STS	TS	N	S	SS
1	Informatif	1. Informasi tentang keuangan dana desa dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat maupun pihak pengguna informasi lainnya baik melalui media elektronik maupun media informasi lainnya.					
		2. Pengumuman terkait keuangan desa baik perencanaan pelaksanaan pertanggungjawaban maupun pengawasan telah dilaksanakan oleh pemerintah desa.					
		3. Akses untuk memperoleh informasi keuangan dana desa tidak berbelit-belit.					
2	Keterbukaan	4. Musyawarah rencana pembangunan musrenbang diikuti oleh musyawarah pimpinan daerah muspida.					

		5. Pejabat pengelola teknik keuangan desa (PPKTD) bersikap terbuka terhadap masyarakat yang membutuhkan informasi tentang keuangan desa.					
		6. Pengelolaan dana desa telah dilakukan secara transparan terbuka baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban maupun hasil pemeriksaan..					
3	Pengungkapan	7. Pemerintah desa sepenuhnya memberikan informasi keuangan yang terbuka menyeluruh dan jujur kepada masyarakat sebagai bukti pertanggungjawaban pemerintah dan pengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya.					
		8. Laporan pertanggungjawaban tahunan selalu dilakukan tepat waktu.					
		9. Transparansi dilakukan sebagai cerminan terlaksananya tanggung jawab organisasi terhadap masyarakat dan lingkungan eksternal antara pemerintah desa dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan yang bersih efektif efisien dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.					

Sumber : Weny Ulfiah (2017)

Indikator 4 : Pengawasan(X3)

No	indikator	Pertanyaan	Skor dan jawaban				
			1 STS	2 TS	3 N	4 S	5 SS
1	Pengawasan penggunaan APBDes	1. Terdapat pengawasan secara teratur oleh badan pengawas daerah atau inspektorat daerah.					
		2. Pengawasan keuangan secara aktif					

		mengawasi pengelolaan keuangan.						
2	Pengawasan oleh masyarakat	3. Aspirasi Masyarakat menjadi dasar dalam rangka penyusunan anggaran.						
3	Pengawasan secara internal dan eksternal	4. Pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal.						
4	Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa	5. BPD secara aktif mengawasi mekanisme penggunaan anggaran.						
5	Pengawasan secara preventif dan represif	6. Terdapat pengawasan preventif yang dilakukan sebelum rencana dilakukan.						
		7. Terdapat pengawasan represif yang dilakukan setelah rencana dilakukan.						

Sumber : *Kuesioner dimodifikasi dari penelitian Luky K, (2015). Hardiyanto, (2013). Rezky, (2014)*

Lampiran 2 Tabulasi Data Pengelolaan Alokasi Dana Desa

NO	PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Y)											JUMLAH
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	Y.11	
1	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	5	52
2	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	52
3	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	4	51
4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	3	4	46
5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	52
6	4	4	4	5	5	4	4	5	4	3	5	47
7	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	54
9	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	52
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
11	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	54
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
15	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	53
16	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	51
17	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	4	49
18	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	4	48
19	4	4	4	4	4	5	5	4	5	2	5	46
20	5	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	46

21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
23	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	54
24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
25	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	53
26	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	47
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
28	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
29	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	51
30	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	41
31	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
32	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	47
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
35	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	54
36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
37	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	50
38	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	3	2	43
39	5	5	5	5	4	4	4	5	3	3	5	5	48
40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
43	5	4	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	52
44	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
45	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	51
46	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	5	49
47	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47
48	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	50
49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	53
50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	54

Lampiran 3 Tabulasi Data Akuntabilitas

N O	AKUNTABILITAS(X1)												JUMLA H
	X1. 1	X1. 2	X1. 3	X1. 4	X1. 5	X1. 6	X1. 7	X1. 8	X1. 9	X1.1 0	X1.1 1	X1.1 2	
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	57
2	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	56
3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
4	4	5	5	4	4	3	4	5	5	4	4	5	52
5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	59
6	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	48
7	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	59
8	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	59
9	4	5	4	4	4	4	2	2	3	4	4	4	44
10	5	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	3	49
11	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	4	57
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
15	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	54
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
17	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	50
18	4	4	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	55
19	5	5	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
20	4	4	2	4	4	4	4	4	2	4	4	4	44
21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60

22	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	54
23	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50
24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
25	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	53
26	5	5	2	3	4	4	5	4	2	5	4	4	4	47
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	57
28	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	58
29	4	4	2	4	4	4	5	5	3	5	5	5	5	50
30	5	5	2	4	3	4	4	4	2	4	4	4	4	45
31	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	59
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
34	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	52
35	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	52
36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
37	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	52
38	5	5	2	5	4	4	5	4	2	4	4	4	4	48
39	5	5	2	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	47
40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
41	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	59
42	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	55
43	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	53
44	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	54
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
46	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	54
47	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	46
48	4	4	4	4	4	4	5	4	2	3	4	4	4	46
49	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	55
50	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	52

Lampiran 3 Tabulasi Data Transparansi

NO	TRANSPARANSI (X2)									JUMLAH
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	
1	4	5	4	5	4	5	5	5	5	42
2	5	5	5	5	5	5	5	4	5	44
3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	37
4	4	4	4	4	5	4	5	4	4	38
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
6	5	4	4	4	4	4	4	4	5	38
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
9	5	5	3	4	4	4	5	5	5	40
10	5	5	4	4	5	4	5	4	5	41
11	5	5	4	3	4	5	4	5	5	40
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
15	4	5	5	5	4	4	4	4	4	39
16	5	4	4	4	4	4	4	3	4	36
17	4	5	4	4	5	5	5	2	3	37
18	4	4	4	4	4	4	5	5	5	39
19	4	4	4	4	4	3	3	4	5	35
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
21	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45

22	5	5	5	4	4	4	4	4	4	39
23	4	5	5	5	5	5	5	5	5	44
24	5	5	5	5	5	4	4	4	4	41
25	4	4	4	4	4	3	3	3	4	33
26	4	4	3	4	4	4	4	4	4	35
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
28	5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
29	4	4	3	4	4	4	4	4	4	35
30	4	4	3	3	4	4	4	2	4	32
31	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
33	5	5	5	5	4	4	4	4	4	40
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
37	4	5	5	5	5	5	5	5	5	44
38	4	4	3	4	4	4	3	3	4	33
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
40	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
42	4	5	4	5	5	5	5	5	4	42
43	4	5	5	4	5	4	5	5	5	42
44	4	4	4	4	5	5	5	5	5	41
45	5	5	4	4	4	5	5	5	5	42
46	4	4	4	5	5	5	5	4	4	40
47	4	4	3	4	4	4	3	4	4	34
48	4	4	3	4	4	3	2	4	5	33
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
50	5	5	5	5	5	5	4	4	4	42

Lampiran 4 Tabulasi Data Pengawasan

NO	PENGAWASAN (X3)							JUMLAH
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	
1	5	5	5	5	5	5	5	35
2	5	5	4	4	5	4	4	31
3	4	4	4	4	4	4	4	28
4	4	4	5	5	5	3	3	29
5	5	5	5	5	5	5	5	35
6	5	5	4	4	4	5	5	32
7	5	5	5	5	5	4	4	33
8	5	5	5	5	5	5	5	35
9	4	4	4	4	4	4	4	28
10	5	5	5	5	4	3	3	30
11	5	5	5	5	5	4	4	33
12	5	5	5	5	5	5	5	35
13	5	5	5	5	5	5	5	35
14	5	5	5	5	5	5	5	35
15	5	5	4	4	4	5	5	32
16	4	4	4	4	4	4	4	28
17	3	4	4	4	4	4	4	27
18	5	5	4	4	4	4	4	30
19	4	4	5	4	4	4	4	29
20	4	4	5	4	4	4	4	29
21	5	5	5	5	5	5	5	35

22	5	5	5	5	5	5	5	35
23	5	5	4	4	4	4	4	30
24	4	4	4	4	4	4	4	28
25	5	5	4	4	4	4	4	30
26	4	4	4	4	4	4	4	28
27	5	5	5	5	5	5	4	34
28	5	5	4	4	5	5	4	32
29	4	4	4	4	5	5	5	31
30	4	4	4	4	4	4	4	28
31	5	5	5	5	5	5	5	35
32	5	5	5	5	5	5	5	35
33	5	4	4	4	5	5	5	32
34	5	4	4	5	4	5	5	32
35	5	5	4	4	4	5	5	32
36	5	5	5	5	5	5	5	35
37	5	5	5	5	5	5	5	35
38	4	4	5	4	4	4	4	29
39	4	4	4	4	4	4	4	28
40	5	5	5	5	5	5	5	35
41	5	5	5	5	5	5	4	34
42	4	4	4	5	5	5	5	32
43	4	5	4	5	5	4	5	32
44	5	5	5	5	5	5	5	35
45	4	4	4	4	4	4	4	28
46	4	4	5	5	5	4	4	31
47	5	5	5	5	5	5	5	35
48	5	5	5	5	5	5	5	35
49	4	4	4	4	4	4	4	28
50	5	5	5	5	5	5	5	35

Lampiran 5 Hasil output SPSS Versi 27

Hasil Uji Statistik Deskriptif
Variabel Dependen dan Independen

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian good governance	50	41	55	51,50	3,765
Akuntabilitas	50	44	60	53,48	5,136
Transparansi	50	32	45	40,10	4,287
Pengawasan	50	27	35	31,86	2,807
Valid N (listwise)	50				

**Hasil Uji Validitas
Akuntabilitas**

		Correlations												Akuntabilitas	
		X1.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	X.7	X.8	X.9	X.10	X.11	X.12		
X1.	Pearson Correlation	1	,775"	,142	,483"	,275	,432"	,382"	,290"	,179	,144	,126	,038		
	Sig. (2-tailed)		,000	,325	,000	,054	,002	,006	,041	,214	,317	,384	,794		
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
X2.	Pearson Correlation	,775"	1	,218	,453"	,244	,324"	,211	,122	,173	,185	,176	,083		
	Sig. (2-tailed)	,000		,129	,001	,088	,022	,140	,398	,229	,199	,221	,565		
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
X3.	Pearson Correlation	,142	,218	1	,503"	,562"	,415"	,178	,311"	,670"	,301"	,408"	,378"		
	Sig. (2-tailed)	,325	,129		,000	,000	,003	,216	,028	,000	,033	,003	,007		
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
X4.	Pearson Correlation	,483"	,453"	,503"	1	,725"	,794"	,550"	,427"	,544"	,381"	,407"	,378"		
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000		,000	,000	,000	,002	,000	,006	,003	,007		
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
X5.	Pearson Correlation	,275	,244	,562"	,725"	1	,860"	,553"	,481"	,633"	,456"	,401"	,511"		
	Sig. (2-tailed)	,054	,088	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,001	,004	,000		
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
X6.	Pearson Correlation	,432"	,324"	,415"	,794"	,860"	1	,614"	,419"	,525"	,456"	,401"	,372"		
	Sig. (2-tailed)	,002	,022	,003	,000	,000		,000	,002	,000	,001	,004	,008		
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
X7.	Pearson Correlation	,382"	,211	,178	,550"	,553"	,614"	1	,736"	,285"	,305"	,331"	,369"		

	Sig. (2-tailed)	.006	.140	.216	.000	.000	.000	.000	.000	.045	.031	.019	.008	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X.8	Pearson Correlation	.290 [*]	.122	.311 [*]	.427 ^{**}	.481 ^{**}	.419 ^{**}	.736 ^{**}	1	.440 ^{**}	.251	.251	.419 ^{**}	.632 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.041	.398	.028	.002	.000	.002	.000		.001	.078	.078	.002	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X.9	Pearson Correlation	.179	.173	.670 ^{**}	.544 ^{**}	.633 ^{**}	.525 ^{**}	.285 ^{**}	.440 ^{**}	1	.601 ^{**}	.527 ^{**}	.561 ^{**}	.811 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.214	.229	.000	.000	.000	.000	.045	.001		.000	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X.1	Pearson Correlation	.144	.185	.301 [*]	.381 ^{**}	.456 ^{**}	.456 ^{**}	.305 [*]	.251	.601 ^{**}	1	.791 ^{**}	.594 ^{**}	.662 ^{**}
0	Sig. (2-tailed)	.317	.199	.033	.006	.001	.001	.031	.078	.000		.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X.1	Pearson Correlation	.126	.176	.408 ^{**}	.407 ^{**}	.401 ^{**}	.401 ^{**}	.331 [*]	.251	.527 ^{**}	.791 ^{**}	1	.702 ^{**}	.669 ^{**}
1	Sig. (2-tailed)	.384	.221	.003	.003	.004	.004	.019	.078	.000	.000	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X.1	Pearson Correlation	.038	.083	.378 ^{**}	.378 ^{**}	.511 ^{**}	.372 ^{**}	.369 ^{**}	.419 ^{**}	.561 ^{**}	.594 ^{**}	.702 ^{**}	1	.665 ^{**}
2	Sig. (2-tailed)	.794	.565	.007	.007	.000	.008	.008	.002	.000	.000	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Aku	Pearson Correlation	.466 ^{**}	.436 ^{**}	.696 ^{**}	.800 ^{**}	.826 ^{**}	.790 ^{**}	.640 ^{**}	.632 ^{**}	.811 ^{**}	.662 ^{**}	.669 ^{**}	.665 ^{**}	1
ntab	Sig. (2-tailed)	.001	.002	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
ilitas	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

^{**}. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

^{*}. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Hasil Uji Validitas
Transparansi**

Correlations												
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	Transparansi		
X2.1	Pearson Correlation	1	,605"	,535"	,341"	,359"	,434"	,362"	,355"	,407"		
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,016	,010	,002	,010	,011	,003		
	N	50	50	49	49	50	50	50	50	50		
X2.2	Pearson Correlation	,605"	1	,707"	,605"	,661"	,608"	,509"	,397"	,789"		
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,004	,000		
	N	50	50	49	49	50	50	50	50	50		
X2.3	Pearson Correlation	,535"	,707"	1	,697"	,654"	,556"	,544"	,445"	,367"		
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,001	,009	,000		
	N	49	49	49	48	49	49	49	49	49		
X2.4	Pearson Correlation	,341"	,606"	,697"	1	,658"	,594"	,494"	,418"	,172		
	Sig. (2-tailed)	,016	,000	,000		,000	,000	,000	,003	,236		
	N	49	49	48	49	49	49	49	49	49		
X2.5	Pearson Correlation	,359"	,605"	,654"	,658"	1	,698"	,693"	,413"	,332"		
	Sig. (2-tailed)	,010	,000	,000	,000		,000	,000	,003	,018		
	N	50	50	49	49	50	50	50	50	50		
X2.6	Pearson Correlation	,434"	,661"	,556"	,594"	,698"	1	,789"	,558"	,351"		
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,013		
	N	50	50	49	49	50	50	50	50	50		

X2.7	Pearson Correlation	,362**	,608**	,544**	,494**	,693**	,789**	1	,585**	,396**	,772**
	Sig. (2-tailed)	,010	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,004	,000
	N	50	50	49	49	50	50	50	50	50	50
X2.8	Pearson Correlation	,355**	,509**	,445**	,418**	,413**	,558**	,585**	1	,778**	,793**
	Sig. (2-tailed)	,011	,000	,001	,003	,003	,000	,000	,000	,000	,000
	N	50	50	49	49	50	50	50	50	50	50
X2.9	Pearson Correlation	,407**	,397**	,367**	,172	,332*	,351*	,396**	,778**	1	,627**
	Sig. (2-tailed)	,003	,004	,009	,236	,018	,013	,004	,000		,000
	N	50	50	49	49	50	50	50	50	50	50
Transparansi	Pearson Correlation	,636**	,789**	,796**	,745**	,749**	,765**	,772**	,793**	,627**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	50	50	49	49	50	50	50	50	50	50

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**Hasil Uji Validitas
Pengawasan**

Correlations									
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	Pengawasan	
X3.1									
Pearson Correlation	1	,846"	,402"	,479"	,465"	,564"	,448"	,786"	
Sig. (2-tailed)		,000	,004	,000	,001	,000	,001	,000	
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X3.2									
Pearson Correlation	,846"	1	,435"	,518"	,503"	,466"	,413"	,776"	
Sig. (2-tailed)	,000		,002	,000	,000	,001	,003	,000	
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X3.3									
Pearson Correlation	,402"	,435"	1	,758"	,597"	,244	,181	,661"	
Sig. (2-tailed)	,004	,002		,000	,000	,087	,209	,000	
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X3.4									
Pearson Correlation	,479"	,518"	,758"	1	,759"	,384"	,391"	,791"	
Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,006	,005	,000	
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X3.5									
Pearson Correlation	,465"	,503"	,597"	,759"	1	,529"	,471"	,803"	
Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000	,000		,000	,001	,000	
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50
X3.6									
Pearson Correlation	,564"	,466"	,244	,384"	,529"	1	,881"	,783"	
Sig. (2-tailed)	,000	,001	,087	,006	,000		,000	,000	
N	50	50	50	50	50	50	50	50	50

X3.7	Pearson Correlation	.448**	.413**	.181	.391**	.471**	.881**	1	.731**
	Sig. (2-tailed)	.001	.003	.209	.005	.001	.000		.000
Pengawasan	N	50	50	50	50	50	50	50	50
	Pearson Correlation	.786**	.776**	.661**	.791**	.803**	.783**	.731**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Akuntabilitas

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items		
Alpha	Items	N of Items
.871	.886	11

Variabel Transparansi

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items		
Alpha	Items	N of Items
.915	.917	9

Variabel Pengawasan

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha Based on Standardized Items		
Alpha	Items	N of Items
.878	.880	7

Hasil Uji Asumsi Klasik

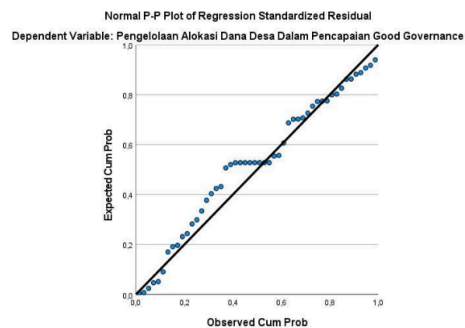
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

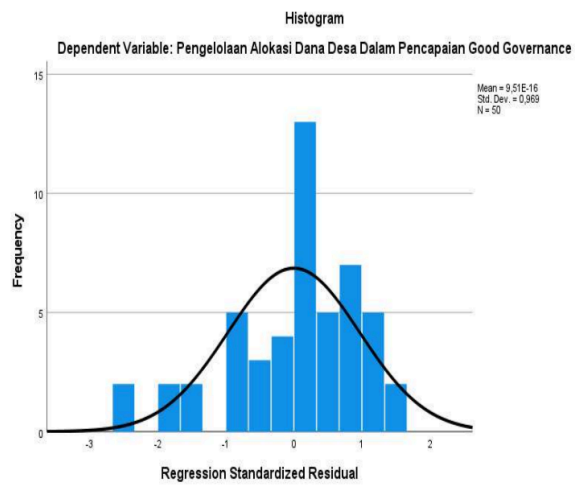
		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,1800000
	Std. Deviation	2,95080756
Most Extreme Differences	Absolute	,122
	Positive	,069
	Negative	-,122
Test Statistic		,122
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		,060
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	,061
	99% Confidence Interval	Lower Bound ,055
		Upper Bound ,067

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.





Hasil Uji Multikolineritas

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
(Constant)	25,079		5,013		5,002	,000		
Akuntabilitas	,312	,114	,426	2,734	,009	,480	2,084	
Transparansi	,324	,134	,369	2,426	,019	,503	1,987	
Pengawasan	-,104	,189	-,077	-,547	,587	,586	1,707	

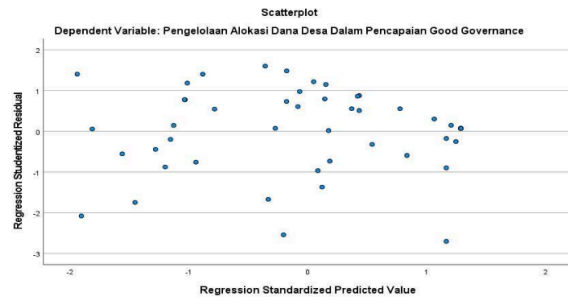
a. Dependent Variable: Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance

Hasil Uji Multikolineritas

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
(Constant)	25,079		5,013		5,002	,000		
Akuntabilitas	,312	,114	,426	2,734	,009	,480	2,084	
Transparansi	,324	,134	,369	2,426	,019	,503	1,987	
Pengawasan	-,104	,189	-,077	-,547	,587	,586	1,707	

a. Dependent Variable: Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error		Beta		
1	(Constant)	24,290	4,698		5,170	,000
	Akuntabilitas	,294	,108	,401	2,730	,009
	Transparansi	,314	,133	,358	2,369	,022
	Pengawasan	-,249	,776	-,038	-,321	,749

a. Dependent Variable: Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance

Hasil Uji Parsial (Uji-T)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error		Beta		
1	(Constant)	24,290	4,698		5,170	,000
	Akuntabilitas	,294	,108	,401	2,730	,009
	Transparansi	,314	,133	,358	2,369	,022
	Pengawasan	-,249	,776	-,038	-,321	,749

a. Dependent Variable: Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pencapaian Good Governance

Hasil Uji Simultan (Uji – F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	320,229	3	106,743	13,119	,000 ^b
	Residual	374,271	46	8,136		
	Total	694,500	49			

a. Dependent Variable: PengelolaanAlokasiDanaDesaDalamPencapaianGoodGovernance

b. Predictors: (Constant), Pengawasan , Akuntabilitas, Transparansi

Hasil Uji Koefisien Determinasi/Adjusted R Square (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,681 ^a	,463	,428	2,846

a. Predictors: (Constant), Pengawasan, Transparansi, Akuntabilitas

Tabel Distribusi Uji Validitas (r) Untuk DF = 1 – 50

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541
31	0.2913	0.3440	0.4032	0.4421	0.5465
32	0.2869	0.3388	0.3972	0.4357	0.5392
33	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.5322
34	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254

35	0.2746	0.3246	0.3810	0.4182	0.5189
36	0.2709	0.3202	0.3760	0.4128	0.5126
37	0.2673	0.3160	0.3712	0.4076	0.5066
38	0.2638	0.3120	0.3665	0.4026	0.5007
39	0.2605	0.3081	0.3621	0.3978	0.4950
40	0.2573	0.3044	0.3578	0.3932	0.4896
41	0.2542	0.3008	0.3536	0.3887	0.4843
42	0.2512	0.2973	0.3496	0.3843	0.4791
43	0.2483	0.2940	0.3457	0.3801	0.4742
44	0.2455	0.2907	0.3420	0.3761	0.4694
45	0.2429	0.2876	0.3384	0.3721	0.4647
46	0.2403	0.2845	0.3348	0.3683	0.4601
47	0.2377	0.2816	0.3314	0.3646	0.4557
48	0.2353	0.2787	0.3281	0.3610	0.4514
49	0.2329	0.2759	0.3249	0.3575	0.4473
50	0.2306	0.2732	0.3218	0.3542	0.4432

Tabel Distribusi Uji Signifikan Parsial (t) Untuk DF = 1 – 39

d.f	t _{0.10}	t _{0.05}	t _{0.025}	t _{0.01}	t _{0.005}
1	3,078	6,314	12,706	31,821	63, 657
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707
7	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499
8	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355
9	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169
11	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106
12	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055
13	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012
14	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977
15	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947
16	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921
17	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898
18	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878
19	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861
20	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845
21	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831
22	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819
23	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807
24	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797
25	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787
26	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779
27	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771
28	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763
29	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756
30	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750
31	1,309	1,696	2,040	2,453	2,744
32	1,309	1,694	2,037	2,449	2,738
33	1,308	1,692	2,035	2,445	2,733
34	1,307	1,691	2,032	2,441	2,728
35	1,306	1,690	2,030	2,438	2,724
36	1,306	1,688	2,028	2,434	2,719
37	1,305	1,687	2,026	2,431	2,715
38	1,304	1,686	2,024	2,429	2,712
39	1,303	1,685	2,023	2,426	2,708

Tabel Distribusi Uji Signifikan Parsial (t) Untuk DF = 40 – 78

df	t _{0.10}	t _{0.05}	t _{0.025}	t _{0.01}	t _{0.005}
40	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704
41	1,303	1,683	2,020	2,421	2,701
42	1,302	1,682	2,018	2,418	2,698
43	1,302	1,681	2,017	2,416	2,695
44	1,301	1,680	2,015	2,414	2,692
45	1,301	1,679	2,014	2,412	2,690
46	1,300	1,679	2,013	2,410	2,687
47	1,300	1,678	2,012	2,408	2,685
48	1,299	1,677	2,011	2,407	2,682
49	1,299	1,677	2,010	2,405	2,680
50	1,299	1,676	2,009	2,403	2,678
51	1,298	1,675	2,008	2,402	2,676
52	1,298	1,675	2,007	2,400	2,674
53	1,298	1,674	2,006	2,399	2,672
54	1,297	1,674	2,005	2,397	2,670
55	1,297	1,673	2,004	2,396	2,668
56	1,297	1,673	2,003	2,395	2,667
57	1,297	1,672	2,002	2,394	2,665
58	1,296	1,672	2,002	2,392	2,663
59	1,296	1,671	2,001	2,391	2,662
60	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660
61	1,296	1,670	2,000	2,389	2,659
62	1,295	1,670	1,999	2,388	2,657
63	1,295	1,669	1,998	2,387	2,656
64	1,295	1,669	1,998	2,386	2,655
65	1,295	1,669	1,997	2,385	2,654
66	1,295	1,668	1,997	2,384	2,652
67	1,294	1,668	1,996	2,383	2,651
68	1,294	1,668	1,995	2,382	2,650
69	1,294	1,667	1,995	2,382	2,649
70	1,294	1,667	1,994	2,381	2,648
71	1,294	1,667	1,994	2,380	2,647
72	1,293	1,666	1,993	2,379	2,646
73	1,293	1,666	1,993	2,379	2,645
74	1,293	1,666	1,993	2,378	2,644
75	1,293	1,665	1,992	2,377	2,643
76	1,293	1,665	1,992	2,376	2,642
77	1,293	1,665	1,991	2,376	2,641
78	1,292	1,665	1,991	2,375	2,640

Tabel Distribusi Uji Signifikan Parsial (t) Untuk DF = 79 – 99

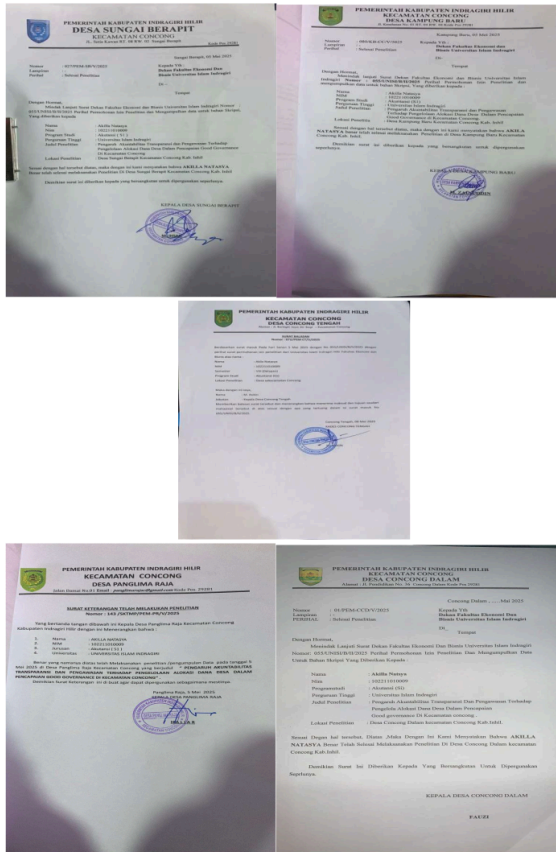
d.f	t _{0.10}	t _{0.05}	t _{0.025}	t _{0.01}	t _{0.005}
79	1,292	1,664	1,990	2,374	2,640
80	1,292	1,664	1,990	2,374	2,639
81	1,292	1,664	1,990	2,373	2,638
82	1,292	1,664	1,989	2,373	2,637
83	1,292	1,663	1,989	2,372	2,636
84	1,292	1,663	1,989	2,372	2,636
85	1,292	1,663	1,988	2,371	2,635
86	1,291	1,663	1,988	2,370	2,634
87	1,291	1,663	1,988	2,370	2,634
88	1,291	1,662	1,987	2,369	2,633
89	1,291	1,662	1,987	2,369	2,632
90	1,291	1,662	1,987	2,368	2,632
91	1,291	1,662	1,986	2,368	2,631
92	1,291	1,662	1,986	2,368	2,630
93	1,291	1,661	1,986	2,367	2,630
94	1,291	1,661	1,986	2,367	2,629
95	1,291	1,661	1,985	2,366	2,629
96	1,290	1,661	1,985	2,366	2,628
97	1,290	1,661	1,985	2,365	2,627
98	1,290	1,661	1,984	2,365	2,627
99	1,290	1,660	1,984	2,365	2,626
Inf.	1,290	1,660	1,984	2,364	2,626

Tabel Distribusi Uji Signifikan Simultan (F) untuk DF = 1 - 100

$\alpha = 0,05$								
$df_1 =$		$df_2 = (k-1)$						
$(n-k-1)$	1	2	3	4	5	6	7	8
1	161.448	199.500	215.707	224.583	230.162	233.986	236.768	238.883
2	18.513	19.000	19.164	19.247	19.296	19.330	19.353	19.371
3	10.128	9.552	9.277	9.117	9.013	8.941	8.887	8.845
4	7.709	6.944	6.591	6.388	6.256	6.163	6.094	6.041
5	6.608	5.786	5.409	5.192	5.050	4.950	4.876	4.818
6	5.987	5.143	4.757	4.534	4.387	4.284	4.207	4.147
7	5.591	4.737	4.347	4.120	3.972	3.866	3.787	3.726
8	5.318	4.459	4.066	3.838	3.687	3.581	3.500	3.438
9	5.117	4.256	3.863	3.633	3.482	3.374	3.293	3.230
10	4.965	4.103	3.708	3.478	3.326	3.217	3.135	3.072
11	4.844	3.982	3.587	3.357	3.204	3.095	3.012	2.948
12	4.747	3.885	3.490	3.259	3.106	2.996	2.913	2.849
13	4.667	3.806	3.411	3.179	3.025	2.915	2.832	2.767
14	4.600	3.739	3.344	3.112	2.958	2.848	2.764	2.699
15	4.543	3.682	3.287	3.056	2.901	2.790	2.707	2.641
16	4.494	3.634	3.239	3.007	2.852	2.741	2.657	2.591
17	4.451	3.592	3.197	2.965	2.810	2.699	2.614	2.548
18	4.414	3.555	3.160	2.928	2.773	2.661	2.577	2.510
19	4.381	3.522	3.127	2.895	2.740	2.628	2.544	2.477
20	4.351	3.493	3.098	2.866	2.711	2.599	2.514	2.447
21	4.325	3.467	3.072	2.840	2.685	2.573	2.488	2.420
22	4.301	3.443	3.049	2.817	2.661	2.549	2.464	2.397
23	4.279	3.422	3.028	2.796	2.640	2.528	2.442	2.375
24	4.260	3.403	3.009	2.776	2.621	2.508	2.423	2.355
25	4.242	3.385	2.991	2.759	2.603	2.490	2.405	2.337
26	4.225	3.369	2.975	2.743	2.587	2.474	2.388	2.321
27	4.210	3.354	2.960	2.728	2.572	2.459	2.373	2.305
28	4.196	3.340	2.947	2.714	2.558	2.445	2.359	2.291
29	4.183	3.328	2.934	2.701	2.545	2.432	2.346	2.278
30	4.171	3.316	2.922	2.690	2.534	2.421	2.334	2.266
31	4.160	3.305	2.911	2.679	2.523	2.409	2.323	2.255
32	4.149	3.295	2.901	2.668	2.512	2.399	2.313	2.244
33	4.139	3.285	2.892	2.659	2.503	2.389	2.303	2.235
34	4.130	3.276	2.883	2.650	2.494	2.380	2.294	2.225
35	4.121	3.267	2.874	2.641	2.485	2.372	2.285	2.217
36	4.113	3.259	2.866	2.634	2.477	2.364	2.277	2.209
37	4.105	3.252	2.859	2.626	2.470	2.356	2.270	2.201
38	4.098	3.245	2.852	2.619	2.463	2.349	2.262	2.194
39	4.091	3.238	2.845	2.612	2.456	2.342	2.255	2.187
40	4.085	3.232	2.839	2.606	2.449	2.336	2.249	2.180
41	4.079	3.226	2.833	2.600	2.443	2.330	2.243	2.174
42	4.073	3.220	2.827	2.594	2.438	2.324	2.237	2.168
43	4.067	3.214	2.822	2.589	2.432	2.318	2.232	2.163
44	4.062	3.209	2.816	2.584	2.427	2.313	2.226	2.157
45	4.057	3.204	2.812	2.579	2.422	2.308	2.221	2.152
46	4.052	3.200	2.807	2.574	2.417	2.304	2.216	2.147
47	4.047	3.195	2.802	2.570	2.413	2.299	2.212	2.143
48	4.043	3.191	2.798	2.565	2.409	2.295	2.207	2.138
49	4.038	3.187	2.794	2.561	2.404	2.290	2.203	2.134
50	4.034	3.183	2.790	2.557	2.400	2.286	2.199	2.130
51	4.030	3.179	2.786	2.553	2.397	2.283	2.195	2.126

52	4.027	3.175	2.783	2.550	2.393	2.279	2.192	2.122
53	4.023	3.172	2.779	2.546	2.389	2.275	2.188	2.119
54	4.020	3.168	2.776	2.543	2.386	2.272	2.185	2.115
55	4.016	3.165	2.773	2.540	2.383	2.269	2.181	2.112
56	4.013	3.162	2.769	2.537	2.380	2.266	2.178	2.109
57	4.010	3.159	2.766	2.534	2.377	2.263	2.175	2.106
58	4.007	3.156	2.764	2.531	2.374	2.260	2.172	2.103
59	4.004	3.153	2.761	2.528	2.371	2.257	2.169	2.100
60	4.001	3.150	2.758	2.525	2.368	2.254	2.167	2.097
61	3.998	3.148	2.755	2.523	2.366	2.251	2.164	2.094
62	3.996	3.145	2.753	2.520	2.363	2.249	2.161	2.092
63	3.993	3.143	2.751	2.518	2.361	2.246	2.159	2.089
64	3.991	3.140	2.748	2.515	2.358	2.244	2.156	2.087
65	3.989	3.138	2.746	2.513	2.356	2.242	2.154	2.084
66	3.986	3.136	2.744	2.511	2.354	2.239	2.152	2.082
67	3.984	3.134	2.742	2.509	2.352	2.237	2.150	2.080
68	3.982	3.132	2.740	2.507	2.350	2.235	2.148	2.078
69	3.980	3.130	2.737	2.505	2.348	2.233	2.145	2.076
70	3.978	3.128	2.736	2.503	2.346	2.231	2.143	2.074
71	3.976	3.126	2.734	2.501	2.344	2.229	2.142	2.072
72	3.974	3.124	2.732	2.499	2.342	2.227	2.140	2.070
73	3.972	3.122	2.730	2.497	2.340	2.226	2.138	2.068
74	3.970	3.120	2.728	2.495	2.338	2.224	2.136	2.066
75	3.968	3.119	2.727	2.494	2.337	2.222	2.134	2.064
76	3.967	3.117	2.725	2.492	2.335	2.220	2.133	2.063
77	3.965	3.115	2.723	2.490	2.333	2.219	2.131	2.061
78	3.963	3.114	2.722	2.489	2.332	2.217	2.129	2.059
79	3.962	3.112	2.720	2.487	2.330	2.216	2.128	2.058
80	3.960	3.111	2.719	2.486	2.329	2.214	2.126	2.056
81	3.959	3.109	2.717	2.484	2.327	2.213	2.125	2.055
82	3.957	3.108	2.716	2.483	2.326	2.211	2.123	2.053
83	3.956	3.107	2.715	2.482	2.324	2.210	2.122	2.052
84	3.955	3.105	2.713	2.480	2.323	2.209	2.121	2.051
85	3.953	3.104	2.712	2.479	2.322	2.207	2.119	2.049
86	3.952	3.103	2.711	2.478	2.321	2.206	2.118	2.048
87	3.951	3.101	2.709	2.476	2.319	2.205	2.117	2.047
88	3.949	3.100	2.708	2.475	2.318	2.203	2.115	2.045
89	3.948	3.099	2.707	2.474	2.317	2.202	2.114	2.044
90	3.947	3.098	2.706	2.473	2.316	2.201	2.113	2.043
91	3.946	3.097	2.705	2.472	2.315	2.200	2.112	2.042
92	3.945	3.095	2.704	2.471	2.313	2.199	2.111	2.041
93	3.943	3.094	2.703	2.470	2.312	2.198	2.110	2.040
94	3.942	3.093	2.701	2.469	2.311	2.197	2.109	2.038
95	3.941	3.092	2.700	2.467	2.310	2.196	2.108	2.037
96	3.940	3.091	2.699	2.466	2.309	2.195	2.106	2.036
97	3.939	3.090	2.698	2.465	2.308	2.194	2.105	2.035
98	3.938	3.089	2.697	2.465	2.307	2.193	2.104	2.034
99	3.937	3.088	2.696	2.464	2.306	2.192	2.103	2.033
100	3.936	3.087	2.696	2.463	2.305	2.191	2.103	2.032

Lampiran 7 telah melakukan Riset (Kuesioner)





Dokumentasi pada saat meminta izin kepada camat concong untuk melakukan riset penelitian



Dokumentasi pada saat Kepala desa dan staff desa kampung baru dan concong tengah mengisi Kuesioner



Dokumentasi pada saat Kepala desa dan staff desa sungai berapit mengisi kuesioner



Dokumentasi pada saat Kepala desa dan staff desa panglima raja dan concong dalam mengisi kuesioner



Dokumentasi pada saat tokoh masyarakat mengisi kuesioner



Dokumentasi pada saat masyarakat mengisi kuesioner

ORIGINALITY REPORT

44%

SIMILARITY INDEX

40%

INTERNET SOURCES

25%

PUBLICATIONS

24%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unisi.ac.id Internet Source	5%
2	jurnal.umsu.ac.id Internet Source	5%
3	repository.umsu.ac.id Internet Source	2%
4	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to Perguruan Tinggi Pelita Bangsa Student Paper	2%
6	repository.um-palembang.ac.id Internet Source	2%
7	jak.uho.ac.id Internet Source	2%
8	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1%
9	Submitted to IAIN Samarinda Student Paper	1%
10	repository.unpkediri.ac.id Internet Source	1%
11	Submitted to Universitas Sains Alquran Student Paper	1%
12	ejournal.areai.or.id Internet Source	1%
13	Submitted to Universitas Papua Student Paper	1%
14	jurnal-stiepari.ac.id Internet Source	1%
15	ejurnal.undana.ac.id Internet Source	1%

16	jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id Internet Source	1 %
17	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1 %
18	repository.unja.ac.id Internet Source	1 %
19	j-innovative.org Internet Source	1 %
20	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
21	Submitted to stie-pembangunan Student Paper	1 %
22	ojs.selodangmayang.com Internet Source	1 %
23	Cicilia Ilat, David P.E. Saerang. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA INSPEKTORAT KOTA TOMOHON", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2015 Publication	<1 %
24	repository.unifa.ac.id Internet Source	<1 %
25	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
26	jurnal.ittc.web.id Internet Source	<1 %
27	lib.ibs.ac.id Internet Source	<1 %
28	repo.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
29	repository.stienobel-indonesia.ac.id Internet Source	<1 %
30	repository.usd.ac.id Internet Source	<1 %
31	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %

32	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	<1 %
33	repository.stiewidyagamalumajang.ac.id Internet Source	<1 %
34	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
35	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
36	eprint.stieww.ac.id Internet Source	<1 %
37	jurnaluniv45sby.ac.id Internet Source	<1 %
38	Submitted to Universitas Wiraraja Student Paper	<1 %
39	etd.uinsyahada.ac.id Internet Source	<1 %
40	ejournal.unhi.ac.id Internet Source	<1 %
41	Safirah Andayani, Ilham Zitri, Darmansyah Darmansyah. "Pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di kelurahan Punia Mataram", Journal Law and Government, 2024 Publication	<1 %
42	Bakri Bakri, Tirta Diliarsi, Fadillah Fadillah, Andi Muhammad Sofian Assuary Yahya, Andi Rahmat, Meti Titus. "Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Gaya Hidup Mahasiswa Akuntansi Gen-Z Di Kota Makassar", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2025 Publication	<1 %
43	Submitted to Universitas Muhammadiyah Buton Student Paper	<1 %
44	Felix Chandra, Sonia Bertha Tiana. "PENGARUH AKTUALISASI DIRI DAN	<1 %

PENGHARGAAN TERHADAP KINERJA
KARYAWAN PADA KANTOR PENYIAR RRI
AMBON", *Equilibrium: Journal of Economics
and Development Studies*, 2023

Publication

45	ejurnal.umri.ac.id Internet Source	<1 %
----	---	------

46	Submitted to STEI Tazkia Student Paper	<1 %
----	---	------

47	es.scribd.com Internet Source	<1 %
----	---	------

48	repository-feb.unpak.ac.id Internet Source	<1 %
----	---	------

49	Endar Ayu Yusnida, Mirza Anindya Pangestika. "PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA SE- KECAMATAN BUMIJAWA", <i>UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi</i> , 2024 Publication	<1 %
----	---	------

50	Andini Setyaningrum, Maya Widyana Dewi, Indra Lila Kusuma. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance", <i>Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis</i> , 2024 Publication	<1 %
----	---	------

51	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
----	---	------

52	repositori.uin-alaududin.ac.id Internet Source	<1 %
----	---	------

53	Novita Supriantikasari, Endang Sri Utami. "PENGARUH RETURN ON ASSETS, DEBT TO EQUITY RATIO, CURRENT RATIO, EARNING PER SHARE DAN NILAI TUKAR TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Kasus Pada Perusahaan Go Public Sektor Barang Konsumsi Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017)", <i>Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana</i> , 2019	<1 %
----	--	------

54	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
55	Submitted to Keimyung University Student Paper	<1 %
56	positori.utu.ac.id Internet Source	<1 %
57	eprints.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
58	Submitted to Jayabaya University Student Paper	<1 %
59	eprints.unpak.ac.id Internet Source	<1 %
60	Nur Indah Pratiwi Lihawa, Sahmin Noholo, Amir Lukum. "Pengaruh Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", Jambura Accounting Review, 2025 Publication	<1 %
61	Submitted to Universitas Bangka Belitung Student Paper	<1 %
62	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
63	Submitted to Universitas Khairun Student Paper	<1 %
64	eprintslib.ummgl.ac.id Internet Source	<1 %
65	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	<1 %
66	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
67	MAKSI MAKSI MAKSI. "Volume 3 Nomor 2 Desember 2012", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2012 Publication	<1 %
68	ejournal.uksw.edu Internet Source	<1 %

69	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %
70	Submitted to Universitas Respati Indonesia Student Paper	<1 %
71	Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper	<1 %
72	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	<1 %
73	Rofi Ahmad, Susilawati. "Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Efektivitas Pengelolaan Dana Desa", JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 2025 Publication	<1 %
74	ejournal.uniks.ac.id Internet Source	<1 %
75	Resindi Elisabet Kaaro, Jenny Morasa, Olivia Sardjono. "Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan APBDes pada Desa Munte Kecamatan Likupang Barat", Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2025 Publication	<1 %
76	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	<1 %
77	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
78	Kalcum Patirol, Tri Oldy Rotinsuloo, George M.V. Kawung. "ANALISIS PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP), PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP NILAI INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG", JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, 2019 Publication	<1 %
79	docplayer.info Internet Source	

<1 %

80

I Gede Putra Adnyana. "Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem", Hita Akuntansi dan Keuangan, 2022

Publication

<1 %

81

Padilah Padilah, Sri Rahayu, Yudi Yudi. "PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA (STUDI PADA PEMERINTAH DESA KABUPATEN BUNGO)", Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja, 2023

Publication

<1 %

82

Widy Tri Sianuri, Fauzi Arif Lubis, Reni Ria Armayani Hasibuan. "ANALISIS CUSTOMERS SWITCHING BEHAVIOR PADA BANK SYARIAH DENGAN PENDEKATAN PUSH - PULL FACTORS (STUDI KASUS PADA NASABAH BANK MUAMALAT KCP SERDANG)", Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 2023

Publication

<1 %

83

digilib.iain-jember.ac.id

Internet Source

<1 %

84

jurnal.usi.ac.id

Internet Source

<1 %

85

Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Tengah

Student Paper

<1 %

86

lib.unnes.ac.id

Internet Source

<1 %

87

Depianti Nursin, Syamsuddin Syamsuddin, Nirwana Nirwana. "Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa dengan Kecerdasan

<1 %

Spiritual Sebagai Variabel Moderasi", Owner, 2022

Publication

88 Meylina Artika, Fitriasuri Fitriasuri, Risa Alvia. FINANSIA : Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, 2023 <1 %
Publication

89 Submitted to Universitas Sanata Dharma <1 %
Student Paper

90 journal.ikopin.ac.id <1 %
Internet Source

91 www.ejournal.warmadewa.ac.id <1 %
Internet Source

92 Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part V <1 %
Student Paper

93 123dok.com <1 %
Internet Source

94 Jeni Nurliza, Bainil Yulina, Nurhasanah. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin", JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi), 2024 <1 %
Publication

95 Lisna Devi, Sri Mulyati, Indah Umiyati. "PENGARUH PENGETAHUAN KEUANGAN, PENGALAMAN KEUANGAN, TINGKAT PENDAPATAN, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PERILAKU KEUANGAN", JASS (Journal of Accounting for Sustainable Society), 2021 <1 %
Publication

96 core.ac.uk <1 %
Internet Source

97 repository.polraf.ac.id <1 %
Internet Source

98 Martha Racwel Patty. "ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DI KECAMATAN SAPARUA TIMUR", *Equilibrium: Journal of Economics and Development Studies*, 2024

Publication

<1 %

99 Rochiyat Setiawan, Ridwan Idham. "PENGARUH KREATIVITAS DAN PENGEMBANGAN KARIER TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN (Studi Kasus Di Hotel Teraskita Cawang Jakarta)", *Jurnal Pariwisata*, 2022

Publication

<1 %

100 Selva Temalagi, Revi W Silooy. "Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru", *Accounting Research Unit (ARU Journal)*, 2022

Publication

<1 %

101 Shabrina Syifa Ardani, Sonny Fransisco, Arcitera Febriyanti, Fathiyah Aida Rizma. "PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI PUSKESMAS BAKTIJAYA KOTA DEPOK", *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2024

Publication

<1 %

102 eprints.umpo.ac.id

Internet Source

<1 %

103 gicipress.com

Internet Source

<1 %

104 jurnal.um-palembang.ac.id

Internet Source

<1 %

105 Anies Indah Hariyanti. SAR (Soedirman Accounting Review) : *Journal of Accounting and Business*, 2017

Publication

<1 %

106 Shinta Dayang Nabilla, Faizal Satria Desitama. "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas,

<1 %

Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan
Keuangan Desa Di Desa Kaligrejeng
Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar",
Journal of Economic, Bussines and Accounting
(COSTING), 2023

Publication

107 dspace.uui.ac.id <1 %
Internet Source

108 repository.upnjatim.ac.id <1 %
Internet Source

109 "ANALISIS PENGARUH TOTAL ASSETS
TURNOVER, WORKING CAPITAL TURNOVER,
DEBT TO EQUITY RATIO, DAN CURRENT RATIO
TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERUSAHAAN", Jurnal Administrasi Bisnis
Terapan, 2022 <1 %
Publication

110 Nita Maina, Johny Subarkah, Yuwita Ariessa
Pravasanti. "Pengaruh Akuntabilitas,
Transparansi dan Partisipasi Masyarakat
terhadap Pengelolaan Dana Desa se-
Kecamatan Sambu Boyolali", Jurnal Ilmiah
Keuangan Akuntansi Bisnis, 2022 <1 %
Publication

111 Tom R. Lawson, Anna C. Faul, A.N. Verbist.
"Research and Statistics for Social Workers",
Routledge, 2019 <1 %
Publication

112 Ade Ayu Anggreni Putri, I Wayan Suidana, I
Putu Deddy Samtaka Putra. "PENGARUH
AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA
DESA PADA DESA SONGAN B KECAMATAN
KINTAMANI KABUPATEN BANGLI", Hita
Akuntansi dan Keuangan, 2021 <1 %
Publication

113 Submitted to Universitas Musamus Merauke <1 %
Student Paper

114 e-journal.umc.ac.id <1 %
Internet Source

115

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

<1 %

116

Goodwill Desember 2013. "Goodwill Vo. 4 No. 2 Desember 2013", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2014

Publication

<1 %

117

Septiawati Septiawati, Achmad Hizazi, Fitriani Mansur. "AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS PADA APARAT DESA DI KECAMATAN TABIR BARAT KABUPATEN MERANGIN)", Jambi Accounting Review (JAR), 2022

Publication

<1 %

118

repository.uinjambi.ac.id

Internet Source

<1 %

119

Novita Srikandi Gloria Gobel, Harijanto Sabijono, Victorina Z. Tirayoh. "Analisis penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa tahun 2023 di Desa Kanonang Satu", Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2024

Publication

<1 %

120

Tika Wulandari, Suyanto Suyanto. "PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman)", Jurnal Akuntansi, 2016

Publication

<1 %

121

M. Hari Purnomo, Anessa Musfitria, Ida Robiyah Adawiyah. "Pengaruh Perputaran Kas, Kecukupan Modal, dan Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas: Studi Pada Perusahaan Perbankan Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2022

Publication

<1 %

122 eprints.unram.ac.id <1 %
Internet Source

123 repository.ar-raniry.ac.id <1 %
Internet Source

124 Ton Duc Thang University <1 %
Publication

125 ANGELINA CAROLIN B2042152001. "ANALISIS
PENGARUH CELEBRITY ENDORSER DAN
PRODUCT QUALITY TERHADAP BUYING
DECISION SERTA DAMPAKNYA PADA
SATISFACTION (Survei Pada Konsumen
Produk Kosmetik Rossa Beauty Di Kota
Pontianak)", Equator Journal of Management
and Entrepreneurship (EJME), 2019
Publication

126 , Rosita Umanailo, Husen Bahasoan, Edy Said
Ningkeula et al. "NASKAH AKADEMIK
KEUANGAN DESA", LawArXiv, 2018
Publication

127 Alifa Ilham Pramudi, Hasim As'ari.
"PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARASI
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA
KARANGLO KECAMATAN GODEAN",
Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset
Sosial Humaniora, 2023
Publication

128 Ana Rokhati, Saifudin Saifudin, Dian Triyani.
"PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA:
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI (STUDI
KASUS PADA DESA GINGGANGTANI,
KECAMATAN GUBUG, KABUPATEN
GROBOGAN)", Solusi, 2020
Publication

129 Hazman Tharis, Ratih Kusumastuti, Netty
Herawaty. "PENGARUH KOMPETENSI
APARATUR, MOTIVASI APARATUR TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA",
Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan,
2022
Publication

130 Jefri Imbiri, Siti Rofingatun, Bill J. C. Pangayow. <1 %
"PENGARUH INVENTARISASI, PEMBUKUAN
DAN PELAPORAN ASET TERHADAP
AKUNTABILITAS PUBLIK PEMERINTAH
DAERAH", Jurnal Akuntansi, Audit, dan Aset,
2018
Publication

131 Luh Putu Pratiwi Sintya Ningsih. <1 %
"PENGARUH
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
PENGAWASAN TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA", Hita Akuntansi
dan Keuangan, 2021
Publication

132 Sundanah, Yuwita Ariessa Pravasanti, Sri <1 %
Laksmi Pardanawati. "Pengaruh Kompetensi
Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen
Organisasi Pemerintah Desa Dan Partisipasi
Masyarakat Terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Dana", Jurnal Ilmiah Keuangan
Akuntansi Bisnis, 2023
Publication

133 MAKSI MAKSI MAKSI. <1 %
"Volume 1 Nomor 1
Desember 2010", JURNAL RISET AKUNTANSI
DAN AUDITING "GOODWILL", 2010
Publication

134 Padlah Riyadi. <1 %
"Pengaruh Kompetensi
Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat,
Komitmen Organisasi Dan Transparansi
Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana
Desa", Journal of Economics, Management,
Accounting and Computer Applications, 2024
Publication

135 Rendi Saputra, Darmanto Darmanto, Suhesti <1 %
Ningsih. "Pengaruh akuntabilitas,
transparansi dan peran perangkat desa
dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan
Juwiring", Journal of Accounting and Digital
Finance, 2022
Publication

136	Alfian Rachmadi Raka Putra, Muslimin Muslimin. "Pengaruh Integritas Dan Moralitas Pada Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Tulangan)", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2024	<1 %

Publication

137	Uswatun Hasanah. "FULL PAPER", VALUE, 2020	<1 %

Publication

138	Widyana Cici Rachmawati, Dian Indudewi. "AKUNTABILITAS DAN TRANSPARASI PENGELOLAN ALOKASI DANA DESA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA BLERONG", Solusi, 2024	<1 %

Publication

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		